RENCANA STRATEGIS

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029. Dokumen ini menjadi pedoman arah pembangunan dan pelayanan selama lima tahun ke depan, sekaligus sebagai wujud komitmen kami dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Renstra ini disusun melalui proses yang sistematis dan partisipatif, mulai dari analisis kondisi existing, perumusan isu strategis, hingga penetapan tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan program prioritas. Penyusunan dilakukan dengan memperhatikan dinamika pembangunan daerah, kebutuhan masyarakat, serta tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan kontribusi dalam penyusunan Renstra. Semoga Renstra ini dapat menjadi landasan kuat bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tenggarong, 24 Desember 2025
Plt. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kutai Kartanegara

Akhmad Taufik Hidayat, S.IP,. MM
NIP. 19670420 198803 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 9

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 9

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah 9

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 13

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan 23

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan 24

2.1.6 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab PD 25

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 25

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 25

2.2.2 Isu Strategis 31

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 36

3.2. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 36

3.1. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 36

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 42

3.4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 45

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 48

4.1. Uraian Program.....48

4.2. Uraian Kegiatan.....50

4.3. Uraian Sub Kegiatan 53

4.4. Uraian Subkegiatan Dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....88

4.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 90

4.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah 92

BAB V PENUTUP 94

DAFTAR TABEL

Tabel Daftar Inventaris Barang dan Aset 15
Tabel 2. 1 Daftar Inventaris Barang dan Aset.....15
Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara 20
Tabel 2. 3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara 22
Tabel 2. 4 Perumusan Masalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.....26
Tabel 2. 5 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD.....32
Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD.....40
Tabel 3. 2 Penahapan Renstra PD 41
Tabel 3. 3 Perumusan Arah Kebijakan Renstra PD.....45
Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD 55
Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan.....71
Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....89
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama PD.....91
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci.....93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Susunan Organisasi PD 12
Gambar 2. 2 Diagram Distribusi SDM Berdasarkan Golongan.....13
Gambar 2. 3 Diagram Distribusi SDM berdasarkan tingkat Pendidikan
Gambar 2. 4 Diagram Distribusi SDM Berdasarkan Pangkat.....14
Gambar 2. 5 Grafik Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kaltim, dan Nasional Tahun 2020–2024 31
Gambar 3. 1 Konsep Renstra PD.....38
Gambar 3. 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD 39
Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD 54

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan jangka panjang Indonesia selama periode 2025–2045 diarahkan untuk mewujudkan "Visi Indonesia Emas 2045" sebagai negara berdaulat, maju, adil, dan makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kontribusi nyata dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah melalui perencanaan strategis yang selaras dengan arah kebijakan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja memiliki peran strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui penguatan kompetensi tenaga kerja, peningkatan produktivitas, fasilitasi penempatan kerja yang inklusif, serta pembangunan kawasan transmigrasi yang berdaya saing.

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Kutai Kartanegara masih menghadapi tantangan yang kompleks, seperti tingkat pengangguran terbuka, rendahnya keterampilan tenaga kerja lokal, serta keterbatasan akses terhadap pelatihan dan informasi pasar kerja. Di sisi lain, pembangunan sektor transmigrasi perlu diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pengurangan ketimpangan antarwilayah melalui penyediaan kawasan baru yang layak huni dan produktif.

Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan target kinerja lima tahunan berdasarkan tugas dan fungsi dinas, serta sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Penyusunan dokumen ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, serta Petunjuk Teknis Studi Pendahuluan Renstra OPD Nomor: P-

355/BAPPEDA/000.7.2/11/2024, dengan tetap memperhatikan dinamika lingkungan strategis dan aspirasi masyarakat.

Dengan demikian, penyusunan Renstra ini tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan instrumen transformasi dalam meningkatkan bidang urusan transmigrasi dan tenaga kerja, guna mendukung terwujudnya visi Kabupaten Kutai Kartanegara: Kutai Kartanegara Idaman Terbaik: Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata, dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan".

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 berpedoman pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4723);
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 No. 194);
4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian;
6) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029;
7) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
8) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

9) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah beserta perubahan-perubahannya;
11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 (sebelumnya dikenal sebagai Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2020) tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait penyelenggaraan ketenagakerjaan dan hubungan industrial;
14) Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi terkait penyelenggaraan transmigrasi;
15) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029;
16) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023–2042;
17) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
18) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2045;
19) Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
20) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029;
21) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

22) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 58 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi dan ketenagakerjaan selama lima tahun ke depan. Renstra ini memastikan bahwa penyelenggaraan urusan dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, terpadu, dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun nasional. Selain itu, Renstra ini berfungsi memperkuat kontribusi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam mendukung pencapaian tujuan RPJMD, terutama dalam perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, penguatan hubungan industrial yang harmonis, serta pengelolaan program transmigrasi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut:

1) Menjabarkan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara ke dalam program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
2) Memberikan arah strategis bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing serta penyelenggaraan program transmigrasi yang terencana dan berkelanjutan;
3) Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
4) Menyediakan acuan dalam pengukuran kinerja melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK);
5) Menjadi dasar pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan urusan transmigrasi dan ketenagakerjaan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
6) Mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Transmirasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1) BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat landasan awal penyusunan Renstra, mulai dari latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, hingga sistematika penulisan dokumen. Bab ini memberikan kerangka dasar untuk memahami konteks dan arah penyusunan Renstra.

1.1 Latar Belakang

Berisi uraian mengenai kondisi umum dan kebutuhan penyusunan Renstra, termasuk perubahan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan daerah yang mempengaruhi urusan transmigrasi dan ketenagakerjaan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat daftar peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, hingga Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud disusunnya Renstra sebagai pedoman strategis penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta tujuan yang ingin dicapai sebagai turunan dari arah pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menjabarkan struktur dan susunan isi Renstra dari Bab I sampai Bab V.

2) BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi internal Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, kapasitas penyelenggaraan urusan, pencapaian kinerja, serta identifikasi permasalahan dan isu strategis yang menjadi dasar perumusan tujuan dan sasaran Renstra.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan kondisi objektif pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, baik dari aspek kelembagaan, sumber daya, capaian kinerja, maupun kelompok sasaran layanan.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berisi penjelasan mengenai tugas pokok, fungsi utama, dan struktur organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sesuai peraturan yang berlaku.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Menguraikan kondisi sumber daya yang dimiliki Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, mencakup sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pembiayaan, serta kapasitas pendukung lainnya.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi capaian kinerja pelayanan pada periode sebelumnya, termasuk kinerja urusan transmigrasi, ketenagakerjaan, dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai tugas dan fungsi dinas.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Menjelaskan kelompok masyarakat atau pihak yang menerima manfaat langsung dari pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, seperti tenaga kerja, pencari kerja, perusahaan, transmigran, dan kelompok masyarakat lainnya.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Menguraikan pihak eksternal yang menjadi mitra strategis dalam penyelenggaraan pelayanan, seperti lembaga pemerintah, dunia usaha, lembaga pelatihan, lembaga swadaya masyarakat, atau instansi lainnya.

2.1.6 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Menjelaskan bentuk kerja sama antar daerah atau pihak lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan transmigrasi dan ketenagakerjaan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bagian ini memuat hasil identifikasi permasalahan utama serta isu strategis yang memengaruhi

penyelenggaraan urusan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan perlu mendapat perhatian dalam perumusan tujuan serta kebijakan dinas lima tahun mendatang.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengidentifikasi permasalahan pelayanan yang dihadapi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja berdasarkan evaluasi kinerja dan analisis kebutuhan.

2.2.2 Isu Strategis

Menguraikan isu-isu penting yang berdampak luas, jangka panjang, dan membutuhkan intervensi strategis dalam penyelenggaraan urusan transmigrasi dan ketenagakerjaan.

3) BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi arah pembangunan lima tahun Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, yang dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi pencapaian, dan arah kebijakan operasional.

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029

Menetapkan tujuan strategis yang ingin dicapai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sesuai kewenangannya dalam mendukung pembangunan daerah.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029

Berisi sasaran spesifik yang terukur dan merupakan penjabaran dari tujuan Renstra.

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Menguraikan strategi yang akan ditempuh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra secara efektif dan efisien.

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Menjabarkan arah kebijakan sebagai pedoman operasional pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan.

4) BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat struktur program Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, serta keterkaitannya dengan prioritas pembangunan daerah.

4.1 Uraian Program

Menguraikan program-program yang menjadi mandat Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam penyelenggaraan urusan transmigrasi dan ketenagakerjaan.

4.2 Uraian Kegiatan

Menjelaskan kegiatan yang mendukung pencapaian program-program Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

4.3 Uraian Subkegiatan

Berisi subkegiatan yang lebih operasional sebagai dasar penyusunan Renja dan penganggaran tahunan.

4.4 Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Menguraikan subkegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang mendukung secara langsung pencapaian program prioritas dalam RPJMD.

4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Menjelaskan indikator utama yang menggambarkan kontribusi strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja terhadap pembangunan daerah.

4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Berisi indikator-indikator kunci untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan transmigrasi dan ketenagakerjaan.

5) BAB V. PENUTUP

Bab ini memberikan penegasan akhir mengenai pentingnya Renstra sebagai pedoman kerja serta menjelaskan mekanisme pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi Renstra, serta memuat:

- Kesimpulan

  Menguraikan ringkasan isi Renstra dan arah strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja secara menyeluruh.

- Kaidah Pelaksanaan

  Menjelaskan prinsip dan ketentuan umum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Renstra.

- Pengendalian dan Evaluasi

Menguraikan mekanisme pemantauan, pelaporan, pengendalian, serta evaluasi pencapaian kinerja selama periode Renstra berlangsung.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan bidang ketransmigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas ini diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 58 Tahun 2023.

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

a. Tugas Pokok

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

a) Perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
b) Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
d) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki struktur organisasi yang terdiri dari berbagai unit kerja yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan tenaga kerja. Susunan organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja meliputi:

a) Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi dan tenaga kerja. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- Merumuskan kebijakan teknis dan administrasi di bidang transmigrasi dan tenaga kerja.
- Mengoordinasikan pelaksanaan program kerja dan kegiatan strategis di lingkungan Dinas.
- Melaksanakan pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- Mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja dan kegiatan di bidang transmigrasi dan tenaga kerja.

b) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan penganggaran, keuangan, dan aset. Sekretariat terdiri atas:

- Subbagian Umum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian

  Mengelola administrasi umum dan ketatalaksanaan, termasuk pengumpulan data, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi terkait urusan kepegawaian.

c) Bidang Transmigrasi

Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Transmigrasi yang bertugas menyajikan data menjadi informasi dan mengoordinasikan urusan perencanaan, pembangunan, dan pengembangan kawasan transmigrasi. Fungsi utamanya mencakup koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, pengembangan kawasan transmigrasi, hingga evaluasi kinerja di bidangnya.

d) Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, bidang ini bertugas mengelola pelatihan kerja berbasis kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan, dan pengembangan produktivitas tenaga

kerja. Fungsi-fungsi yang dijalankan meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis terkait pelatihan serta monitoring dan evaluasi terhadap program peningkatan produktivitas.

e) Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Bidang ini bertugas mengelola perencanaan tenaga kerja, penerbitan izin, pelayanan antar kerja, dan pengelolaan informasi pasar kerja. Kepala Bidang bertanggung jawab atas penyajian data menjadi informasi, serta mengoordinasikan pengelolaan informasi pasar kerja dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

f) Bidang Hubungan Industrial

Bidang ini bertugas mengelola pengesahan peraturan perusahaan, pendaftaran perjanjian kerja, pencegahan, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Fungsi utamanya meliputi pengelolaan hubungan industrial dan pengawasan pelaksanaan peraturan di bidang ketenagakerjaan.

g) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan yang memiliki fungsi dan tugas spesifik berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan pelaksana mengelola tugas-tugas administrasi pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan organisasi.

h) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan teknis operasional di lapangan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan oleh Dinas.

Bagan struktur organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara menggambarkan hubungan kerja antarunit, alur pelaksanaan tugas, serta tanggung jawab masing-masing bagian. Bagan ini disusun berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 dan menunjukkan posisi hierarki dari Kepala Dinas hingga Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Gambar 2. 1 Susunan Organisasi PD

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Oleh karena itu, ketersediaan dan kualitas ASN yang sesuai dengan kebutuhan organisasi sangat memengaruhi efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Adapun distribusi SDM pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan sebagai berikut.

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah pegawai pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja hingga tahun 2024 tercatat sebanyak 64 orang. Berdasarkan jenjang pendidikan dan kompetensi, terdapat variasi kualifikasi yang memerlukan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan untuk mendukung pelayanan yang profesional dan adaptif.

1) Distribusi SDM berdasarkan Golongan

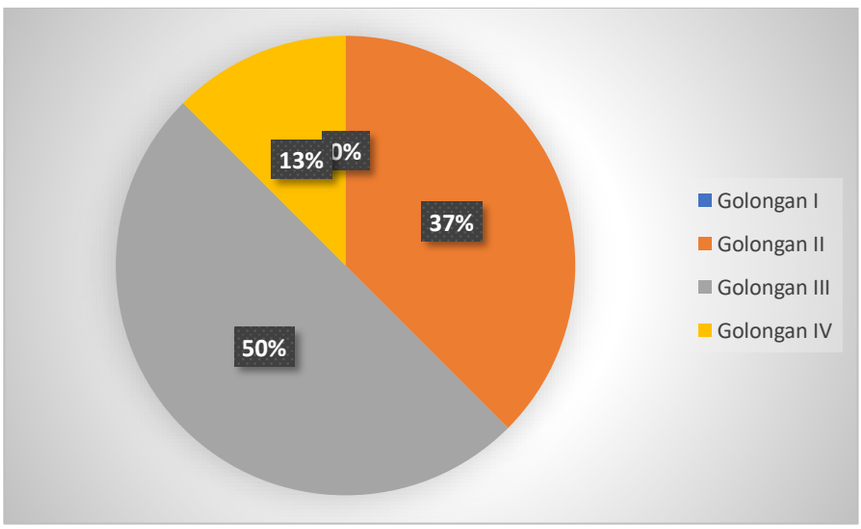

Gambar 2. 2 Diagram Distribusi SDM Berdasarkan Golongan

Berdasarkan distribusi pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, jumlah pegawai tercatat sebanyak 64 orang. Sebagian besar berada pada Golongan III sebanyak 32 orang (50%), diikuti oleh Golongan II sebanyak 24 orang (37,50%), serta Golongan IV sebanyak 8 orang (12,50%).

2) Distribusi SDM berdasarkan tingkat Pendidikan:

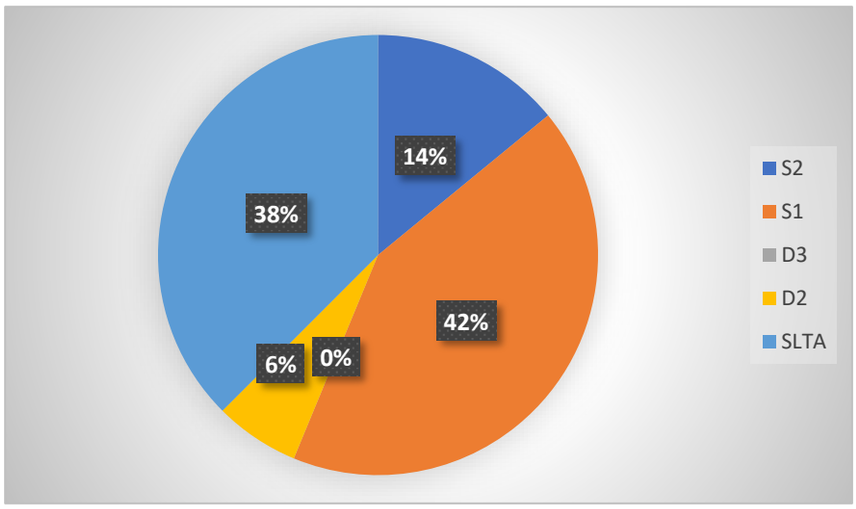

Gambar 2. 3 Diagram Distribusi SDM berdasarkan tingkat Pendidikan

Berdasarkan distribusi tingkat pendidikan pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, dari total 64 orang pegawai, mayoritas berpendidikan S1 sebanyak 27 orang (42,2%), diikuti SLTA sebanyak 24 orang (37,5%), S2 sebanyak 9 orang (14,1%), serta D2 sebanyak 4 orang (6,3%).

3) Distribusi SDM berdasarkan Pangkat:

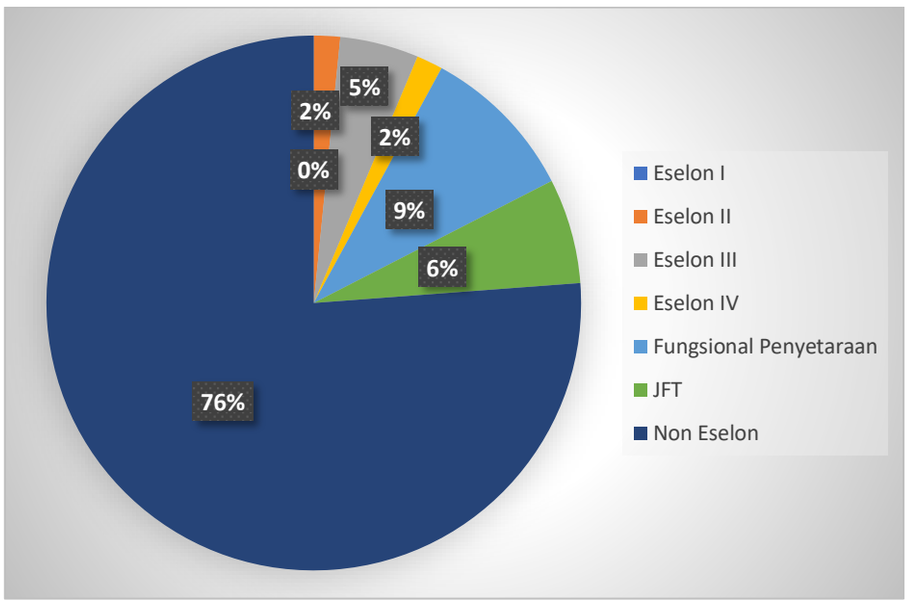

Gambar 2. 4 Diagram Distribusi SDM Berdasarkan Pangkat

Berdasarkan distribusi pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara menurut tingkat pendidikan, dari total 64 pegawai mayoritas berpendidikan S1 sebanyak 27 orang (42,2%). Selanjutnya, terdapat 24 orang lulusan SLTA (37,5%), 9 orang

berpendidikan S2 (14,1%), dan 4 orang lulusan D2 (6,3%), sementara tidak ada pegawai dengan latar belakang pendidikan D3. Komposisi ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar pegawai sudah berpendidikan tinggi, masih diperlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan maupun pendidikan lanjutan agar kinerja pelayanan publik semakin optimal.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor yang menunjang kinerja perangkat daerah. Keberhasilan dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan bergantung pada kualitas sarana yang dimiliki. Dalam konteks ini, sarana fisik seperti gedung kantor, ruang pertemuan, dan fasilitas pendukung lainnya menjadi fundamental dalam menciptakan lingkungan kerja yang efisien.

Tabel 2. 1 Daftar Inventaris Barang dan Aset

No	Jenis Barang	Kondisi Barang		Jumlah Barang
		Baik	Rusak Berat	
1	Tanah Kaveling (dst)	3		3
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1		1
3	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	1		1
4	Air Compresor	1		1
5	Portable Generating Set	1		1
6	Pompa Air	1		1
7	Sedan		1	1
8	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)		8	8
9	Sepeda Motor		31	31
10	perkakas bengkel service lainnya (dst)	8		8
11	perkakas pengangkat lainnya (dst)	2		2
12	Tool Kit Box	1		1
13	Tool Cabinet Set	1		1
14	perkakas bengkel kerja lainnya (dst)	11		11
15	Mesin Gerinda tangan Listrik	1		1
16	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	1		1
17	Global Positioning System	1	2	3
18	Fuel Injection Test	3		3

No	Jenis Barang	Kondisi Barang		Jumlah Barang
		Baik	Rusak Berat	
19	alat ukur lainnya lainnya (dst)	4		4
20	alat pengolahan tanah dan tanaman lainnya (dst)	1		1
21	Lemari Penyimpan	8		8
22	Ragum /Catok	4		4
23	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)		8	8
24	Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inci)		1	1
25	Mesin Absen (Time Recorder)	3		3
26	Mesin Fotocopy Folio	1		1
27	Lemari Kayu	1		1
28	Rak Kayu		4	4
29	Filing Cabinet Besi	4		4
30	Brandkas		2	2
31	Lemari Kaca	5	3	8
32	CCTV - Camera Control Television System		31	31
33	White Board	3		3
34	LCD Projector/Infocus	6		6
35	Focusing Screen/Layar LCD Projector	3		3
36	Papan Pengumuman	1		1
37	Alat Kantor Lainnya	2		2
38	Meja Rapat	11	29	40
39	Kursi Rapat	142	10	152
40	Kursi Tamu		2	2
41	Sofa		3	3
42	Lemari Es	1	2	3
43	A.C. Window	1	11	12
44	A.C. Split	18	11	29
45	Treng Air/Tandon Air	2		2
46	Televisi	3		3
47	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		1	1
48	Sound System	3		3
49	Camera film	3		3
50	Mesin Jahit	20		20
51	Tangga Aluminium	1	1	2
52	Dispenser	1		1
53	Handy Cam		2	2
54	Gordyin/Kray		1	1
55	Alat Rumah Tangga Lain-lain	4		4
56	Alat Pemadam/Portable		1	1
57	Alat Pemadam Kebakaran lainnya		6	6

No	Jenis Barang	Kondisi Barang		Jumlah Barang
		Baik	Rusak Berat	
58	Meja Kerja Pejabat Eselon II	8	1	9
59	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	1	3
60	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	14	4	18
61	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	40	59	99
62	Meja Kerja Pejabat lain-lain	13		13
63	Meja Rapat Pejabat lainnya	1		1
64	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3		3
65	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3		3
66	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	14	3	17
67	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	23	137	160
68	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1	9	10
69	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	15	8	23
70	Microphone/Wireless MIC	5		5
71	Uninterruptible Power Supply (UPS)		5	5
72	Encoder/Decoder		4	4
73	Camera Electronic	1		1
74	Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)		4	4
75	Layar Film/Projector	2	1	3
76	LCD Monitor	1		1
77	Clipp On	1		1
78	Alat Studio Video Lainnya	1		1
79	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)		1	1
80	Wireless Amplifier	1		1
81	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	1		1
82	TV Monitor	2		2
83	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	1		1
84	Personal Computer	11		11
85	Mainframe (Komputer Jaringan)	1		1
86	Komputer Jaringan lainnya		8	8
87	P.C Unit	35	26	61

No	Jenis Barang	Kondisi Barang		Jumlah Barang
		Baik	Rusak Berat	
88	Lap Top	15	7	22
89	Note Book	6	8	14
90	Hard Disk	3	5	8
91	Monitor	6		6
92	Printer (Peralatan Personal Komputer)	31	35	66
93	alat bantu ekplorasi lainnya lainnya (dst)	1		1
94	Air Conditioning (AC)	8		8
95	alat peraga pelatihan lainnya (dst)	5		5
96	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4		
97	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	1		
98	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2		
99	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1		
100	Bangunan Klinik/Puskesmas		1	
101	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi Permanen		1	
102	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen		1	
103	Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan	2		
104	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1		
105	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1		
106	Rumah Negara Gol II Lain-lain	1		
107	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Semi Permanen		3	
108	Pagar Permanen	1		
109	Jalan Desa		2	
110	Jalan Desa Lain-lain		1	
111	Saluran Drainage		2	
112	Instalasi Benteng		1	
113	Tanaman Hias		1	
114	Software		5	
115	Kajian		2	
116	Peralatan dan Mesin Rusak Berat		6	
117	Gedung dan Bangunan Rusak Berat		1	
	Jumlah Total	**582**	**524**	**1065**

Sumber: KIB, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

Berdasarkan data barang inventaris asset menunjukkan bahwa terrdapat 524 unit barang dalam kondisi rusak berat, sehingga memerlukan peremajaan terhadap unit yang rusak serta dilakukan penghapusan asset agar tidak menjadi beban dinas.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Evaluasi kinerja pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) selama periode Renstra 2021–2024. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pembangunan ketenagakerjaan dan pengembangan kawasan transmigrasi di daerah. Penilaian kinerja pelayanan mencakup tiga dimensi utama, yaitu:

a) Pencapaian target output dan outcome sesuai indikator yang ditetapkan;
b) Kebermanfaatan layanan terhadap masyarakat, khususnya pencari kerja, pekerja, dan calon transmigran;
c) Kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam penurunan pengangguran, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta penyediaan wilayah baru melalui transmigrasi.

Secara umum, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja telah menunjukkan kinerja yang cukup baik pada beberapa indikator strategis, terutama dalam hal penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, fasilitasi penempatan tenaga kerja, serta pelayanan informasi pasar kerja. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam hal perluasan kerja sama penempatan kerja lintas daerah, optimalisasi jejaring transmigrasi antarkabupaten/provinsi, serta peningkatan peran UPTD dalam mendukung penyelenggaraan layanan teknis. Tabel berikut menyajikan rekapitulasi kinerja pelayanan dan anggaran realisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2021–2024:

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun-					Rasio Capaian Tahun-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				70,11	71,30	71,50	73,00	75,30	69,56	79,29	81,80	71,92	71,76	99,22	111,21	114,41	98,52	-98,30
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi				3,00	14,75	18,59	20,50	28,19	3,50	13,58	22,90	20,08	19,69-	106,67	104,27	123,18	102,34	-84,36
3	Penyediaan Pusat Latihan Tenaga Kerja KUKAR IDAMAN				1,00	2,00	3,00	2,00	3,00	1,00	2,00	2,00	2,00	3,00-	100,00	100,00	66,67	100,00	100,00
4	Cakupan Layanan Data Informasi Tenaga Kerja Di Wilayah Kecamatan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten				6,41	8,39	10,37	12,35	14,33	9,20	13,75	14,46	18,05-	21,23	125,12	109,65	139,44	146,15	148,15
6	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang terfasilitasi				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel capaian kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat enam indikator utama yang dipantau selama periode 2021–2024. Nilai SAKIP perangkat daerah menunjukkan tren positif, dari target 70,11 pada 2021 dan meningkat menjadi 73 pada 2024, dengan realisasi yang sempat mencapai 81,8 pada 2023. Secara rasio, capaian tertinggi tercatat pada 2023 sebesar 114,41%, meskipun menurun kembali pada 2024 menjadi 98,52%.

Pada indikator persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi, target meningkat dari 3% pada 2021 menjadi 20,5% pada 2024. Realisasi menunjukkan progres signifikan, dari 3,5% pada 2021 hingga 22,9% pada 2023, meskipun sedikit menurun di 2024 sebesar 20,08%. Rasio capaian bahkan melampaui 120% pada 2023, menandakan efektivitas program pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja. Untuk indikator penyediaan pusat latihan tenaga kerja KUKAR IDAMAN, target ditetapkan bertahap antara 1–3 unit per tahun. Realisasi cenderung konsisten, meskipun pada 2023 hanya tercapai dua dari tiga target (rasio 66,67%), kemudian kembali mencapai 100% pada 2024. Indikator cakupan layanan data informasi tenaga kerja di wilayah kecamatan menunjukkan capaian yang stabil, dengan target dan realisasi konsisten di angka 100% selama empat tahun berturut-turut, sehingga rasio pencapaiannya juga tetap 100%. Selanjutnya, indikator persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten mengalami peningkatan dari target 6,41% pada 2021 menjadi 14,33% pada 2024. Realisasi menunjukkan hasil yang cukup baik, dari 9,2% pada 2021 hingga 14,46% pada 2023, dengan rasio capaian tertinggi pada 2023 sebesar 132,59%. Terakhir, indikator persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang terfasilitasi menunjukkan kinerja sangat baik dengan capaian konsisten 100% sepanjang periode 2021–2024, sesuai dengan target yang ditetapkan.

Secara umum, capaian kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menunjukkan tren positif dan konsisten, dengan beberapa indikator bahkan melampaui target yang ditetapkan, khususnya pada sertifikasi tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja.

Tabel 2. 3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara

Uraian	Anggaran pada Tahun ke - (dalam ribu)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribu)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.	14.194.963	13.014.937	13.335.176	15.239.271	12.605.992.	12.712.278	11.703.330	12.107.678	7.797.691	9604.231.414	90 %	90%	91%	51%	76,19 %
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing,	3.825.208	17.025.170	27.398.269	29.398.044	18.734.982.390	3.630.594	16.473.805	25.971.872	5.950.163	13.651.616.438	95 %	97%	95%	20%	72,86%
Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru	844.364	249.496	525.000	481.537.660	481.537.660	146.892	239.388	661.628	119.753	143.135.270	17 %	96%	126 %	9%	29,72 %

Berdasarkan data anggaran dan realisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat tiga program utama yang menjadi fokus penganggaran periode 2021–2024. Pertama, program meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja dinas menunjukkan alokasi anggaran yang relatif stabil, dari Rp14,19 miliar pada 2021 hingga Rp15,63 miliar pada 2025. Realisasi anggaran pada periode 2021–2023 berada di kisaran Rp11,7–12,7 miliar dengan rasio 90–91%, namun pada 2024 realisasi menurun drastis menjadi Rp7,79 miliar atau hanya 51% dari target.

Kedua, program peningkatan kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing memperoleh alokasi anggaran terbesar dengan tren peningkatan signifikan, dari Rp3,82 miliar pada 2021 hingga Rp29,39 miliar pada 2024. Realisasi anggaran cenderung mengikuti tren, misalnya Rp3,63 miliar pada 2021, meningkat menjadi Rp25,97 miliar pada 2023. Rasio capaian cukup tinggi pada 2021–2023 dengan kisaran 95–97%, tetapi turun tajam pada 2024 menjadi hanya 20%.

Ketiga, program perencanaan, pembangunan, dan pengembangan kawasan transmigrasi baru mendapatkan anggaran yang bervariasi, mulai dari Rp844 juta pada 2021 hingga Rp1,4 miliar pada 2024–2025. Realisasi menunjukkan fluktuasi yang tajam: pada 2021 hanya Rp146,9 juta (rasio 17%), naik signifikan di 2023 menjadi Rp661,6 juta (rasio 126%), namun kembali turun pada 2024 menjadi Rp119,7 juta atau hanya 9% dari target.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun program kompetensi tenaga kerja dan akuntabilitas kinerja relatif terjaga hingga 2023, terjadi penurunan tajam realisasi pada 2024, terutama pada aspek transparansi serta pengembangan kawasan transmigrasi, yang memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di tahun berikutnya.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan ketenagakerjaan dan transmigrasi yang inklusif, berdaya saing, serta selaras dengan arah pembangunan daerah, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan kelompok sasaran layanan sebagai fondasi strategis dalam pelaksanaan program selama periode 2025–

2029. Kelompok sasaran ini mencerminkan komitmen terhadap pemerataan kesempatan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan kelembagaan transmigrasi. Berikut kelompok sasaran layanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara:

1) Pekerja Lokal, Pencari kerja aktif, yang mencakup angkatan kerja usia produktif yang belum terserap dalam pasar kerja formal, termasuk, lulusan pendidikan menengah dan tinggi, serta masyarakat usia produktif yang belum mendapatkan pekerjaan tetap.
2) Tenaga kerja informal dan rentan termasuk pekerja sektor pertanian, perkebunan, dan usaha mikro yang belum memiliki perlindungan sosial dan keterampilan kerja memadai.
3) Masyarakat transmigran dan calon transmigran yang memerlukan akses terhadap pelatihan keterampilan, pembinaan usaha, dan penempatan di lokasi transmigrasi yang layak serta produktif.
4) Pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang membutuhkan dukungan dalam pengembangan kapasitas tenaga kerja dan tata kelola ketenagakerjaan.
5) Kelompok perempuan dan penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan struktural dalam mengakses program pelatihan dan peluang kerja, serta pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan kerja yang inklusif dan akses layanan yang setara.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Disamping itu ada beberapa Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan, seperti:

a. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dimana bagi setiap karyawan perusahan swasta/pemerintah wajib masuk kedalam program jaminan sosial bagi tenaga kerja. Selain itu BPJS memberikan perlindungan pekerja sektor formal dan informal.
b. Polri dan Kejaksaan, apabila terjadi penindakan terhadap pelanggaran hukum ketenagakerjaan, seperti perdagangan orang atau pekerja ilegal.
c. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dimana diperlukannya melindungi hak dan kepentingan pekerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menjadi pihak dalam perundingan tripartit.

d. Serikat Pekerja, dimana dapat melindungi hak dan kepentinga pekerja, melakukan perundingan dan advokasi, meningkatkan kesejahteraan dan kondisi kerja, memberikan bantuan hukum, dan mendorong partisipasi pekerja dalam pengambilan keputusan.

2.1.6. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Berikut adalah Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja meliputi:

a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dimana kolaborasi dalam pelatihan vokasi, pengembangan SDM, dan pendidikan kejuruan.
b) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dimana memerlukan kerja sama dalam penyediaan tenaga kerja di sektor industri dan manufaktur.
c) Dinas Sosial, dimana Program pemberdayaan masyarakat, bantuan sosial untuk pengangguran, dan pelatihan keterampilan bagi kelompok rentan.
d) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dimana Pelatihan kewirausahaan dan dukungan bagi pekerja yang ingin membuka usaha sendiri seperti penyaluran modal usaha kecil bagi tenaga kerja informal.
e) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dimana Perencanaan program strategis daerah yang menyangkut ketenagakerjaan.
f) Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai kepanjangan tangan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam pelauanan pembuatan AK.1 (Kartu Kuning di Kecamatan)

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di hadapkan berbagai macam permasalahan dan isu strategis baik di tingkat perangkat daerah hingga global sesuai dengan arah kebijakan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 maupun Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagai berikut:

2.2.1. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara didasarkan pada berbagai permasalahan

yang berkembang baik di lingkungan internal maupun eksternal. Permasalahan ini memiliki keterkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas, yang memengaruhi pencapaian tujuan strategis organisasi. Oleh karena itu, sumber daya yang tersedia harus dikelola secara optimal guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Secara umum, pembangunan di bidang transmigrasi dan ketenagakerjaan di Kabupaten Kutai Kartanegara telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Berbagai program kerja telah menghasilkan capaian yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pengembangan kawasan transmigrasi dan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi. Namun demikian, terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang masih membutuhkan perhatian dan penanganan secara sistematis dan berkelanjutan.

Tabel 2. 4 Perumusan Masalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

PERMASALAHAN POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Tingkat pengangguran terbuka dan setengah pengangguran masih tinggi, terutama di kalangan pemuda	- Tingginya jumlah pengangguran lulusan SMA/SMK. - Banyak tenaga kerja muda tidak terserap industri. - Penempatan tenaga kerja lokal belum optimal, termasuk untuk kebutuhan IKN.	- Mismatch keterampilan dengan kebutuhan industri. - Link and match pendidikan–industri lemah. - Minimnya informasi pasar kerja dan peluang kerja terbaru. - Koordinasi penempatan tenaga kerja belum efektif. - Belum adanya sistem pelaporan lowongan kerja yang terintegrasi.
Ketimpangan akses pelatihan kerja antar wilayah	- Fasilitas pelatihan tidak merata antar kecamatan. - Pelatihan berbasis kompetensi sulit dijangkau oleh masyarakat di wilayah terpencil.	- Infrastruktur dan sarana pelatihan kurang memadai. - Keterbatasan anggaran penyelenggaraan pelatihan. - Minimnya kemitraan lembaga pelatihan dengan industri. - Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelatihan masih rendah.

PERMASALAHAN POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Rendahnya daya saing tenaga kerja akibat keterbatasan keterampilan (skill gap)	- Tenaga kerja tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan permintaan industri (skill mismatch). - Sertifikasi kompetensi tenaga kerja masih rendah.	- Kurangnya pelatihan berbasis kebutuhan industri (demand-driven training). - Tidak adanya data kebutuhan kompetensi industri yang terbarukan. - Minimnya program peningkatan soft skill dan literasi ketenagakerjaan.
Kurang optimalnya pengelolaan lokasi transmigrasi	- Pemanfaatan HPL transmigrasi tidak maksimal. - Tanah restan (tanah R) tidak dapat dimanfaatkan. - Pengembangan kawasan transmigrasi belum terarah.	- HPL transmigrasi berada di kewenangan pusat. - Belum ada kawasan transmigrasi baru yang ditetapkan. - Koordinasi pusat–daerah dalam perencanaan kawasan belum optimal. - Infrastruktur dasar kawasan transmigrasi masih terbatas.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang telah dilakukan, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara menghadapi sejumlah tantangan utama yang dapat dipetakan dalam masing-masing bidang urusan sebagai berikut:

1) Bidang Penempatan Tenaga Kerja

Masalah pokok yang dihadapi adalah kurangnya efektivitas dalam penempatan tenaga kerja, terutama dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya koordinasi antara perusahaan dan Dinas terkait kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan, serta tidak adanya sistem pelaporan yang terintegrasi. Banyak perusahaan juga tidak melaporkan informasi lowongan kerja secara terbuka, dan tenaga kerja dari luar daerah sering kali bekerja di Kutai Kartanegara tanpa melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD). Akar permasalahan ini adalah kurangnya regulasi yang tegas, minimnya pengawasan, dan keterbatasan kapasitas SDM di Dinas.

2) Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Rendahnya kualitas SDM menjadi masalah pokok, yang disebabkan oleh kesenjangan keterampilan angkatan kerja dengan kebutuhan industri. Masalah ini diperparah oleh kurangnya

infrastruktur pelatihan yang memadai di wilayah Kutai Kartanegara, sehingga angkatan kerja tidak memiliki akses pelatihan berbasis kompetensi. Selain itu, tidak adanya informasi yang relevan tentang kebutuhan keterampilan dari industri membuat pelatihan yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelatihan kerja juga menjadi hambatan yang signifikan.

3) Bidang Hubungan Industrial

Masalah pokok di bidang ini adalah tingginya angka perselisihan hubungan industrial, khususnya terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan perselisihan hak pekerja. Hal ini sering terjadi di sektor perkebunan, kayu, dan pertambangan, yang ditandai dengan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan. Selain itu, banyak pekerja yang menghadapi masalah pembayaran pesangon, hak-hak lainnya, dan PHK sepihak akibat perbedaan interpretasi terhadap peraturan ketenagakerjaan. Akar masalah ini terletak pada minimnya pengawasan regulasi dan kurangnya kapasitas dalam proses mediasi dan penyelesaian perselisihan.

4) Bidang Ketransmigrasian

Kendala utama yang dihadapi adalah pengelolaan kawasan transmigrasi, terutama terkait pemanfaatan lahan Hak Pengelolaan (HPL) yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan daerah kesulitan dalam memanfaatkan potensi lahan untuk mendukung program transmigrasi dan pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, tanah restan (tanah R) yang tidak dapat dimanfaatkan, serta belum adanya penetapan kawasan transmigrasi baru, menjadi hambatan lain yang memengaruhi perkembangan program transmigrasi. Akar masalah ini adalah kurangnya koordinasi dan regulasi yang tidak mendukung desentralisasi pengelolaan kawasan transmigrasi.

Atas hasil identifikasi ini, permasalahan yang paling dominan dan membutuhkan perhatian segera adalah kesenjangan keterampilan angkatan kerja dengan kebutuhan industri, serta kurangnya data yang terintegrasi terkait kebutuhan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut berupa perbaikan sistem informasi

ketenagakerjaan, penguatan kolaborasi dengan pihak industri, dan peningkatan kualitas pelatihan kerja untuk mendukung daya saing tenaga kerja lokal.

1) Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042. RTRW ini dirancang untuk mewujudkan Kutai Kartanegara sebagai daerah mitra Ibu Kota Nusantara (IKN) yang handal, dengan pemerataan pembangunan yang terintegrasi berbasis kawasan andalan melalui sektor industri, pertanian, pariwisata, dan perdagangan yang berwawasan lingkungan.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan juga selaras dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan KLHS, prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi bagian integral dalam penyusunan kebijakan dan program Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk memastikan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Arahan RTRW Terkait dengan Kewenangan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

1) Penyediaan Lahan Kawasan Transmigrasi:
   - Pemanfaatan HPL transmigrasi untuk mendukung pengembangan kawasan transmigrasi di wilayah pasca-tambang dan kawasan pertanian.
   - Penetapan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dengan kebutuhan ekonomi lokal.
2) Pengembangan Kawasan Produktif:
   - Optimalisasi lahan transmigrasi sebagai kawasan budi daya berbasis potensi lokal, seperti pertanian dan perikanan, untuk mendukung ketahanan pangan.
   - Sinergi dengan pengembangan kawasan strategis nasional di sekitar IKN untuk menyerap tenaga kerja lokal.

3) Peningkatan Jaringan Infrastruktur Pendukung:
   - Peningkatan infrastruktur dasar di kawasan transmigrasi untuk mendukung mobilitas tenaga kerja dan produktivitas ekonomi.
   - Arahan KLHS Terkait Perlindungan Lingkungan Hidup

1) Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Transmigrasi:
   - Pemanfaatan lahan transmigrasi dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
   - Pengelolaan tanah restan (tanah R) di kawasan transmigrasi untuk mencegah degradasi lingkungan.

2) Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim:
   - Pengelolaan kawasan transmigrasi untuk mendukung program mitigasi perubahan iklim, seperti melalui penggunaan energi terbarukan di kawasan transmigrasi.

3) Pengendalian Dampak Kegiatan Ekonomi:
   - Setiap kegiatan ekonomi di kawasan transmigrasi, termasuk pasca-tambang, harus dilengkapi dengan kajian lingkungan dan mitigasi dampak ekologis.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyelaraskan arah kebijakannya dengan RTRW dan KLHS untuk mendukung pembangunan yang terintegrasi, berbasis potensi lokal, dan berkelanjutan. Implementasi kebijakan ini menjadi landasan bagi pengembangan kawasan transmigrasi yang inklusif dan ramah lingkungan, sekaligus mendukung pembangunan IKN dan pengentasan permasalahan ketenagakerjaan di Kutai Kartanegara.

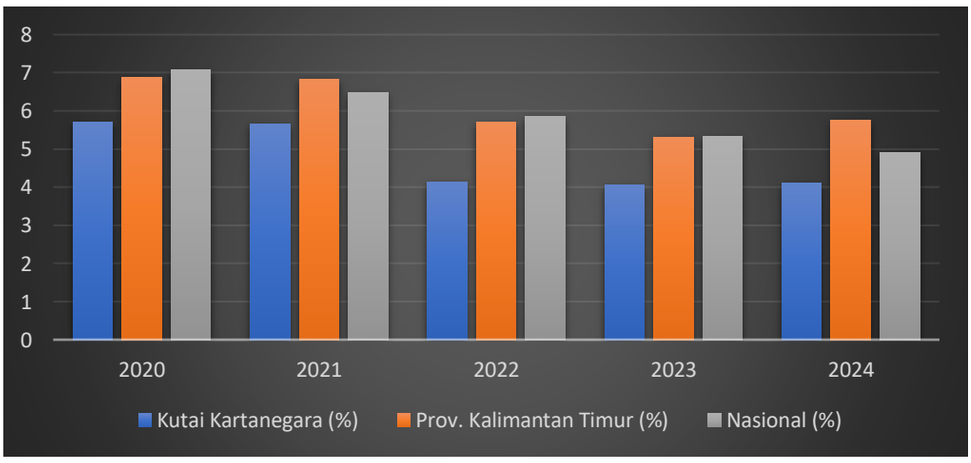

Gambar 2. 5 Grafik Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kaltim, dan Nasional Tahun 2020–2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren menurun. Pada tahun

2020 TPT berada pada angka 5,70%, lalu turun menjadi 5,66% (2021), dan mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022 menjadi 4,14%. Pada tahun 2023 mencapai 4,05%, dan pada 2024 berada pada angka 4,11%. Angka tersebut secara konsisten lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Kalimantan Timur maupun nasional pada periode yang sama.

Penurunan TPT ini menunjukkan dinamika pemulihan ekonomi pascapandemi serta meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Namun, tantangan tetap signifikan karena pengangguran masih didominasi oleh kelompok usia muda dan lulusan SMA/SMK, yang belum terserap ke pasar kerja karena keterbatasan keterampilan dan mismatch antara kompetensi dengan kebutuhan industri. Kondisi ini sejalan dengan temuan RPJMD bahwa pengangguran dengan pendidikan SMA merupakan yang tertinggi pada tahun 2024 (12.274 orang).

Fakta tersebut menjadi dasar penetapan isu strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja terkait penurunan tingkat pengangguran, peningkatan akses dan relevansi pelatihan kerja, serta optimalisasi penempatan tenaga kerja berbasis kebutuhan industri sebagai prioritas utama pada periode 2025–2029.

2.2.2. Isu Strategis

Isu-isu strategis yang menjadi fokus dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara didasarkan pada kondisi aktual yang memengaruhi urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi dalam jangka waktu ke depan. Apabila tidak diantisipasi, isu-isu tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi pembangunan daerah, baik dalam konteks ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Berbagai tantangan dan peluang yang telah diidentifikasi melalui analisis permasalahan, tantangan, dan potensi pengembangan mendasari perumusan isu strategis ini. Isu strategis ditentukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap pencapaian sasaran pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, serta kemampuannya untuk dikelola secara efektif.

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ketersediaan tenaga kerja usia produktif yang tinggi di wilayah perdesaan dan eks-transmigrasi	Tingkat pengangguran terbuka dan setengah pengangguran masih tinggi, terutama di kalangan pemuda	Belum tercapainya target nasional untuk indikator setengah pengangguran dan pekerja informal (3 indikator TPB SB)	SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Target 8.5: Pekerjaan penuh & produktif; Target 8.6: Mengurangi pemuda NEET).	Prioritas penurunan tingkat pengangguran (terbuka & terselubung), penciptaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan produktivitas, penanganan pengangguran usia muda.	Tingginya angka pengangguran usia muda, kebutuhan diversifikasi ekonomi di luar sektor ekstraktif, dampak fluktuasi harga komoditas, penyiapan SDM lokal menghadapi peluang & persaingan kerja terkait IKN.	Perluasan akses pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri
Lokasi transmigrasi potensial dengan akses lahan dan sumber daya alam	Ketimpangan akses pelatihan kerja antar wilayah	Ketimpangan akses pelatihan kerja yang berpotensi menghambat pencapaian TPB 10(Kesenjangan) dan peningkatan keterampilan (TPB 4.4.1*).	SDG 4: Pendidikan Berkualitas (Target 4.3 & 4.4: Akses setara ke pendidikan teknis/vokasi & keterampilan relevan). SDG 10: Mengurangi Kesenjangan (Target 10.2 & 10.3: Kesetaraan kesempatan).	Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi (TVET), peningkatan relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri ("link and match"), perluasan akses pelatihan berkualitas ke seluruh wilayah, termasuk daerah tertinggal/terpencil.	Kesenjangan akses fasilitas pelatihan antara perkotaan (Samarinda, Balikpapan) dengan daerah hulu/pedalaman, kebutuhan pelatihan spesifik untuk mendukung IKN dan sektor ekonomi baru (pariwisata, industri pengolahan, jasa).	Perbaikan mekanisme penempatan tenaga kerja dan transmigrasi yang lebih partisipatif dan berkelanjutan
Pertumbuhan UMKM yang dapat menyerap tenaga kerja loka	Rendahnya daya saing tenaga kerja akibat keterbatasan keterampilan	Rendahnya keterampilan tenaga kerja (TPB 4.4.1*) yang berpotensi mempengaruhi produktivitas (SB 8.2.1*).	SDG 4: Pendidikan Berkualitas (Target 4.4: Keterampilan relevan untuk pekerjaan). SDG 8: Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi (Target 8.2: Peningkatan produktivitas ekonomi).	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM, pengembangan kompetensi & sertifikasi profesi, penyesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja (mengatasi skills mismatch), peningkatan produktivitas tenaga kerja.	Adanya skills mismatch antara lulusan dengan kebutuhan industri Kaltim yang berubah, kebutuhan upskilling & reskilling untuk mendukung diversifikasi ekonomi dan IKN, peningkatan daya saing tenaga kerja lokal di tengah potensi masuknya tenaga kerja dari luar.	Inklusi kelompok rentan dalam program ketenagakerjaan
Lembaga pelatihan kerja yang sudah ada dan dapat dimaksimalkan fungsinya	kurang optimalnya pengelolaan lokasi transmigrasi	Pengelolaan lokasi transmigrasi yang belum optimal berpotensi mengabaikan pertimbangan daya dukung & daya tampung lingkungan serta efisiensi SDA (Muatan Dasar KLHS).	SDG 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan (Target 11.3: Perencanaan & pengelolaan permukiman berkelanjutan). SDG 15: Ekosistem Daratan (Target 15.9:	Pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, keterkaitan program transmigrasi dengan ketahanan pangan dan pengembangan komoditas, pengelolaan	Tantangan penyediaan infrastruktur dasar yang memadai di lokasi transmigrasi, keberlanjutan mata pencaharian (khususnya pertanian), pencegahan konflik lahan, pengelolaan	Penguatan sinergi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi digital dalam layanan publik

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Integrasi nilai ekosistem dalam perencanaan).	kawasan yang berkelanjutan, penyediaan infrastruktur dasar, integrasi sosial-ekonomi.	dampak lingkungan (deforestasi, lahan gambut), integrasi transmigran dengan masyarakat lokal, penataan ruang kawasan.	

Berdasarkan hasil pemetaan potensi daerah, permasalahan perangkat daerah, isu-isu KLHS yang relevan, serta dinamika lingkungan strategis pada level global, nasional, dan regional, maka Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang akan menjadi fokus utama dalam perencanaan lima tahun ke depan. Isu-isu tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang strategis yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, terutama dalam konteks transformasi ekonomi daerah dan kebutuhan tenaga kerja yang kompetitif untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dari keseluruhan analisis, terdapat empat isu strategis yang diprioritaskan karena dampaknya yang langsung terhadap peningkatan kualitas SDM, perluasan kesempatan kerja, dan penguatan tata kelola pelayanan publik.

1) Perluasan akses pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri

Isu strategis ini muncul dari ketimpangan akses pelatihan kerja antarwilayah serta rendahnya relevansi program pelatihan dengan kebutuhan nyata industri, termasuk sektor yang berkembang pesat seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara. Akses terhadap pelatihan vokasi masih lebih banyak tersedia di wilayah perkotaan, sementara masyarakat di kecamatan hulu dan kawasan eks transmigrasi belum memperoleh kesempatan yang setara. Pada saat yang sama, industri menuntut kompetensi yang semakin spesifik dalam menghadapi perkembangan teknologi dan transformasi ekonomi. Perluasan akses pelatihan kerja menjadi agenda penting untuk mengatasi ketidaksesuaian keterampilan, meningkatkan daya saing angkatan kerja muda, dan memastikan tenaga kerja lokal mampu berkompetisi serta memperoleh peluang kerja yang lebih luas.

2) Perbaikan mekanisme penempatan tenaga kerja dan transmigrasi yang lebih partisipatif dan berkelanjutan

Isu ini berkaitan dengan masih terbatasnya efektivitas penempatan tenaga kerja dan belum optimalnya pengelolaan kawasan transmigrasi. Pelaporan kebutuhan tenaga kerja dari sektor industri belum berjalan dengan baik sehingga penyerapan tenaga kerja lokal belum mencapai hasil yang diharapkan. Selain itu, pengembangan kawasan transmigrasi menghadapi kendala dalam pemanfaatan lahan serta koordinasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat. Perbaikan mekanisme penempatan tenaga kerja dan transmigrasi diperlukan agar seluruh pemangku kepentingan dapat terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pendekatan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan akan mendukung peningkatan peluang kerja, mendorong pemanfaatan potensi kawasan transmigrasi, serta memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi daerah.

3) Inklusi kelompok rentan dalam program ketenagakerjaan

Isu ini berangkat dari kenyataan bahwa kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, pemuda yang tidak bekerja dan tidak bersekolah, pekerja informal, dan masyarakat di wilayah terpencil masih menghadapi hambatan besar dalam memperoleh akses terhadap pekerjaan yang layak. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya akses terhadap pelatihan, minimnya pendampingan karier, dan keterbatasan fasilitas layanan ketenagakerjaan yang ramah bagi kelompok rentan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, inklusi kelompok rentan menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, program ketenagakerjaan harus dirancang agar mampu menjangkau kelompok rentan melalui penyediaan layanan yang lebih adaptif dan aksesibel.

4) Penguatan sinergi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi digital dalam layanan publik

Isu strategis ini berkaitan dengan kebutuhan peningkatan tata kelola pelayanan ketenagakerjaan dan transmigrasi melalui integrasi antarsektor serta pemanfaatan teknologi digital. Transformasi ekonomi daerah dan pembangunan Ibu Kota Nusantara mendorong

perlunya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah, dunia industri, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital menjadi faktor penting dalam penyediaan data ketenagakerjaan yang lebih akurat, pelayanan administrasi yang cepat, serta penyediaan informasi pasar kerja yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Penguatan sinergi lintas sektor dan digitalisasi layanan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran, efisien, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan tenaga kerja.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuan ini berorientasi pada penyelesaian isu-isu strategis yang telah diidentifikasi dan diarahkan untuk mendukung visi Kutai Kartanegara Idaman Terbaik yaitu "Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata, dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan". dan misi ke 1 yaitu "Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial". Selaras dengan tujuan RPJMD yaitu Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat melalui indikator Tingkat kemiskinan yang semakin menurun. peningkatan kualitas SDM, terbukanya lapangan kerja, dan penurunan ketimpangan merupakan komponen yang saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan maka dirumuskan tujuan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 2025–2029 sebagai berikut.

1) Tujuan: Meningkatkan kualitas kesempatan kerja masyarakat dan kawasan transmigrasi.
    - Indikator Tujuan:
        - Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi
        - Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

3.2. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah dengan sasaran RPJMD Meningkatnya Kesempatan Kerja dan menurunnya ketimpangan, untuk pencapaiansasaran RPJMD serta pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran ini dirumuskan untuk memberikan arah dan fokus pada pelaksanaan program dan kegiatan secara terukur dan terarah sebagai berikut.

1) Sasaran: Meningkatnya Cakupan program transmigrasi yang dilaksanakan
    - Indikator: Persentase Program Transmigrasi yang dilaksanakan
2) Sasaran: Meningkatnya kompetensi dan kapasitas tenaga kerja
    - Indikator: Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi.
3) Sasaran: Meningkatnya tenaga kerja yang bekerja di sektor formal
    - Indikator: Persentase Penduduk Bekerja 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja di Sektor Formal.

Indikator Makro dalam Tujuan dan Sasaran Renstra

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator makro pembangunan daerah yang secara langsung dipengaruhi oleh kualitas, penyerapan, dan distribusi tenaga kerja. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, serta informasi pasar kerja, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja memegang peran sentral dalam mendukung pencapaian target penurunan TPT sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD 2025–2029.

Data TPT Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi dan variasi yang cukup signifikan menurut kelompok pendidikan maupun jenis kelamin. Kondisi ini menegaskan perlunya intervensi strategis berupa peningkatan kompetensi tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, penyelarasan permintaan dan penawaran tenaga kerja, penguatan hubungan industrial, serta pengembangan kawasan transmigrasi produktif sebagai pusat pertumbuhan baru.

Oleh karena itu, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka diintegrasikan menjadi bagian penting dari tujuan dan sasaran Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2025–2029, yang dijabarkan melalui sasaran operasional sebagai berikut:

1) Meningkatnya cakupan program transmigrasi yang dilaksanakan

    Peningkatan cakupan dan kualitas pelaksanaan program transmigrasi berkontribusi pada penurunan TPT melalui pembukaan kawasan permukiman produktif dan penciptaan lapangan kerja baru di sektor pertanian, usaha mikro, dan

ekonomi lokal. Program transmigrasi juga berfungsi mengurangi tekanan pengangguran di wilayah padat penduduk dengan membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru.

2) Meningkatnya kompetensi dan kapasitas tenaga kerja

Peningkatan kompetensi melalui peningkatan pendidikan, pelatihan berbasis kompetensi, dan sertifikasi profesi sangat krusial karena kelompok pendidikan menengah dan rendah merupakan penyumbang terbesar angka pengangguran. Dengan peningkatan kapasitas dan daya saing tenaga kerja, peluang penempatan pada sektor unggulan dan sektor penyangga IKN akan meningkat sehingga berdampak langsung pada penurunan TPT.

3) Meningkatnya tenaga kerja yang bekerja di sektor formal

Tenaga kerja di sektor formal cenderung memiliki stabilitas kerja yang lebih tinggi dan berkontribusi lebih besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Melalui penguatan hubungan industrial, fasilitasi peraturan perusahaan, dan perluasan kerja sama penempatan tenaga kerja, sektor formal mampu menyerap tenaga kerja lebih besar sehingga berpengaruh signifikan terhadap penurunan TPT.

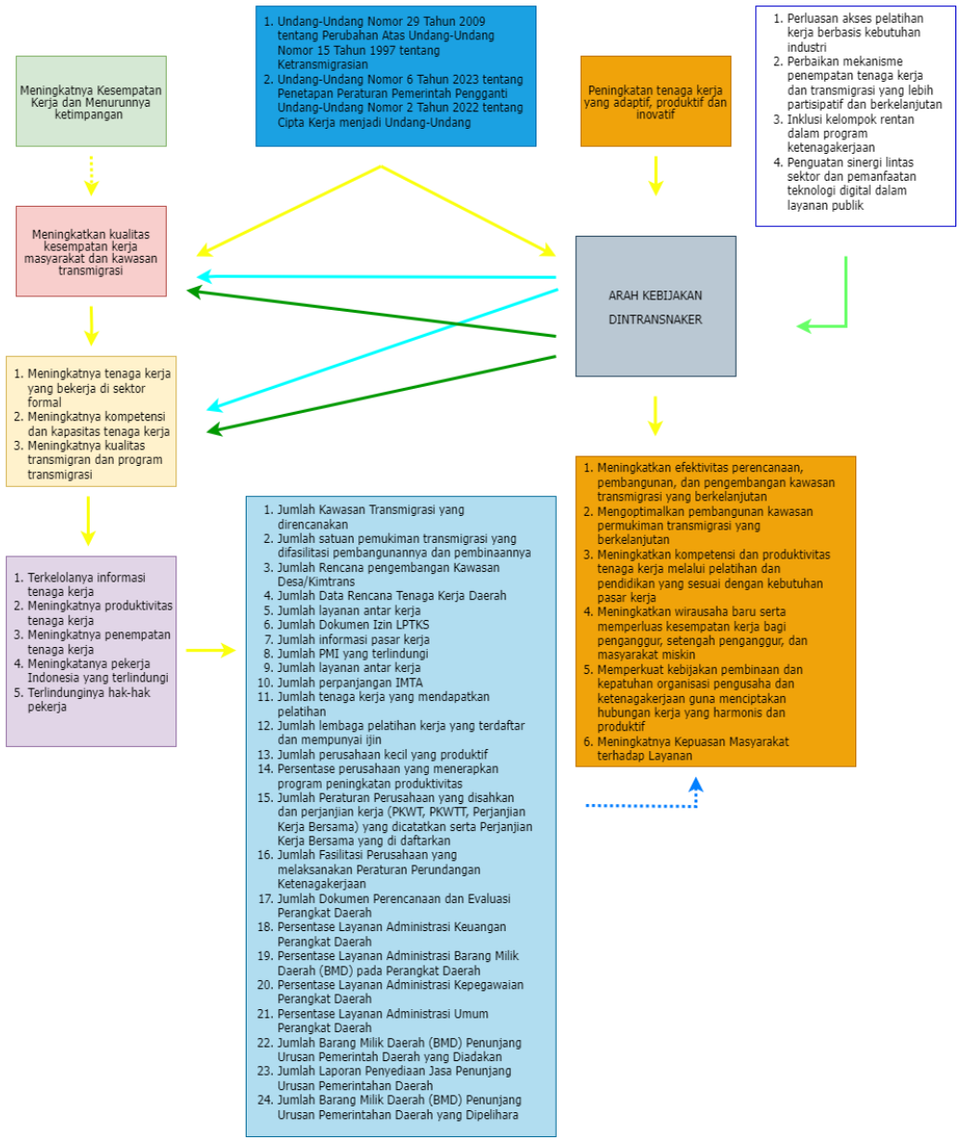

Gambar 3. 1 Konsep Renstra PD

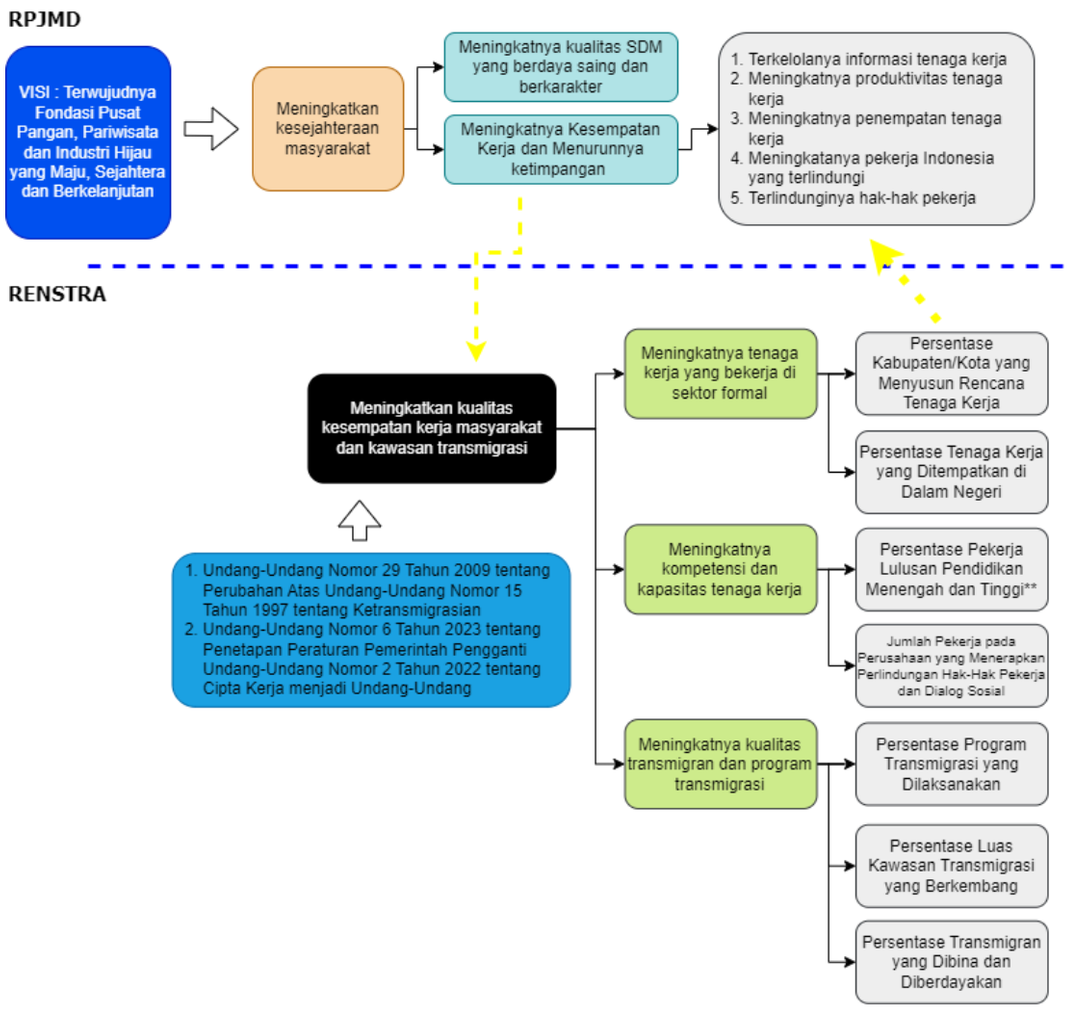

Gambar 3. 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

Tujuan dan sasaran ini disusun untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif, terukur, dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, daya saing tenaga kerja, serta pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan. Rencana target pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dapat ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	.(2)	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.	Meningkatkan kualitas kesempatan kerja masyarakat dan kawasan transmigrasi		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	38,02	39,21	40,60	42,19	44,01	46,10	48,57	
			Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi	15	25	50	75	100	100,00	100,00	
		Meningkatnya tenaga kerja yang bekerja di sektor formal	Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja di Sektor Formal	49,66	50,93	52,18	53,37	54,49	55,56	56,56	
		Meningkatnya kompetensi dan kapasitas tenaga kerja	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi**	54,62	56,89	59,10	61,20	63,20	65,11	66,92	
		Meningkatnya Cakupan program transmigrasi yang dilaksanakan	Persentase Program Transmigrasi yang dilaksanakanTransmigrasi	15	18,00	25,00	50,00	75,00	100,00	100,00	

Tabel tersebut menggambarkan tahapan teknis dalam perumusan dan implementasi program strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2025 hingga 2030. Perencanaan ini mencakup keterkaitan yang sistematis antara tujuan strategis, sasaran spesifik, indikator kinerja, dan target kinerja tahunan yang ditetapkan secara bertahap.

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

a. Pentahapan

Dalam rangka pencapaian Tujuan, Sasaran Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Periode 2025-2029 selama periode RPJMD yang pencapaiannya perlu dilakukan rumusan pentahapan prioritas pembangunan yang akan dilakukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra PD

TAHAP I(2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	*.(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Sinkronisasi RKT dengan RPJMD & RTRW	Pembangunan infrastruktur produktif transmigrasi (jalan, air, komunikasi)	Replikasi model pembangunan kawasan transmigrasi	Revisi Rencana Kawasan sesuai capaian dan kebutuhan baru	Audit kawasan dan dampaknya terhadap pengurangan pengangguran
Identifikasi kebutuhan investasi infrastruktur kerja	Pendampingan kelompok usaha lokal	Insentif fiskal untuk investor lokal di kawasan	Penguatan kelembagaan pengelola kawasan	Penyusunan kebijakan pengembangan jangka panjang kawasan transmigrasi
Penyusunan masterplan kawasan prioritas	Sertifikasi berbasis SKKNI dan KKNI	Pelatihan advance: digital, green economy, industri kreatif	Harmonisasi pelatihan dengan kerangka AQRF & TVET	Penyusunan peta jalan kompetensi tenaga kerja daerah
Pelatihan berbasis demand-driven	Pelatihan lintas sektor bersama dunia usaha	Benchmark pelatihan dengan provinsi lain	Pelatihan wirausaha bagi tenaga kerja terlatih	Evaluasi dampak pelatihan terhadap kesejahteraan tenaga kerja
Penguatan kelembagaan BLK	Integrasi pelatihan dengan kurikulum pendidikan formal	Penempatan tenaga kerja formal lintas sektor	Kolaborasi sistem pelatihan dan penempatan kerja	Finalisasi database tenaga kerja formal
Pemutakhiran data profil tenaga kerja	Fasilitasi lowongan kerja formal berkelanjutan	Kolaborasi dengan Kementerian & Lembaga	MOU lintas sektor formal & BUMN	Evaluasi keterserapan & mobilitas tenaga kerja sektor formal

TAHAP I(2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	*.(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Penyusunan peta peluang kerja sektor formal	Penerapan sistem tracer alumni	Penguatan data akurat pencari kerja	Penilaian indeks harmonisasi industrial	Penyusunan kebijakan hubungan industrial jangka panjang - Penguatan kelembagaan hubungan industrial di tingkat daerah
Penyusunan peta jalan portal penempatan kerja digital	Peluncuran portal penempatan kerja digital	Penguatan Job Matching Center	Evaluasi efektivitas forum industrial	Pengembangan dashboard hubungan kerja berbasis data real-time
Kajian baseline hubungan industrial	Fasilitasi dialog sosial tripartit	Pengembangan Aplikasi Pelaporan Industrial	Perluasan jangkauan aplikasi pelaporan industrial	Audit relasi kerja untuk pencegahan konflik

Rencana strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara disusun secara bertahap dalam lima tahapan implementasi program dari tahun 2026 hingga 2030. Setiap tahapan menggambarkan kesinambungan logis dari perencanaan kebijakan, penguatan kelembagaan, hingga pengembangan ekosistem ketenagakerjaan dan transmigrasi.

1) Tahap I (2026) berfokus pada penataan awal, sinkronisasi dokumen perencanaan seperti RKT dengan RPJMD dan RTRW, serta penyusunan peta jalan dan masterplan infrastruktur kerja dan transmigrasi. Kegiatan penting meliputi identifikasi kebutuhan investasi, pelatihan berbasis permintaan pasar kerja (demand-driven), pembentukan Industrial Relation Task Force, dan peluncuran portal digital ketenagakerjaan. Pada tahap ini juga dilakukan pemutakhiran data tenaga kerja dan penyusunan regulasi lokal yang mendukung.
2) Tahap II (2027) diarahkan pada pembangunan infrastruktur transmigrasi produktif, pendampingan kelompok usaha lokal, dan integrasi program pelatihan lintas sektor. Selain itu, difokuskan juga pada sertifikasi kompetensi berbasis SKKNI dan KKNI, penguatan job matching center, sistem tracer alumni, serta sosialisasi dan edukasi norma ketenagakerjaan. Tahapan ini

menyiapkan fondasi sistem koordinasi lintas dunia usaha dan pendidikan vokasi.

3) Tahap III (2028) merupakan fase replikasi dan penguatan data. Model pembangunan kawasan transmigrasi yang telah berjalan direplikasi, disertai insentif fiskal bagi investor lokal di kawasan. Di sisi ketenagakerjaan, difokuskan pada pelatihan advance seperti green economy dan industri kreatif, benchmark dengan provinsi lain, serta penguatan data akurat pencari kerja. Tahap ini juga menekankan kolaborasi lintas sektor dengan kementerian/lembaga.
4) Tahap IV (2029) menjadi tahap harmonisasi dan pengembangan sistem. Dilakukan revisi terhadap rencana kawasan transmigrasi, harmonisasi pelatihan dengan kerangka AQRF dan TVET, serta kolaborasi sistem pelatihan dan penempatan kerja formal dengan BUMN. Pengembangan dashboard berbasis data real-time dilakukan untuk memantau hubungan kerja dan industrialisasi di daerah.
5) Tahap V (2030) adalah tahap evaluasi dan penyempurnaan kebijakan jangka panjang. Fokus diarahkan pada audit dampak kawasan transmigrasi terhadap pengurangan pengangguran, penyusunan kebijakan kawasan transmigrasi jangka panjang, serta finalisasi database tenaga kerja formal. Pada fase ini juga dilakukan evaluasi terhadap ketersebaran dan mobilitas tenaga kerja sektor formal serta penyusunan kebijakan hubungan industrial jangka panjang yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, tahapan ini menunjukkan arah pembangunan yang terintegrasi antara peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, penguatan hubungan industrial, dan kebijakan berbasis data untuk mendukung kemajuan sektor transmigrasi dan ketenagakerjaan di Kutai Kartanegara secara berkelanjutan.

b. Strategi

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan bidang transmigrasi dan ketenagakerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, serta dalam menjawab tantangan pembangunan daerah dan dinamika pasar kerja, maka strategi dan arah kebijakan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja disusun secara sinergis dan operasional. Strategi pembangunan tersebut dirumuskan untuk mendukung pemantapan ketahanan sosial yang berkualitas, inklusif, berkeadilan dan berbudaya menuju akselerasi transformasi pembangunan, dan pengelolaan kawasan transmigrasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Adapun strategi pembangunan yang diusung adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan efektivitas perencanaan, pembangunan, dan pengembangan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan
b) Mengoptimalkan pembangunan kawasan permukiman transmigrasi yang berkelanjutan
c) Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
d) Meningkatkan jumlah wirausaha baru serta memperluas kesempatan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, dan masyarakat miskin
e) Memperkuat kebijakan pembinaan dan kepatuhan organisasi pengusaha dan ketenagakerjaan guna menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan produktif
f) Meningkatkan kualitas layanan publik melalui penguatan standar pelayanan, partisipasi masyarakat, dan sistem monitoring yang terintegrasi

3.4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi-strategi tersebut diterjemahkan ke dalam arah kebijakan perangkat daerah yang menjadi landasan operasional program dan

kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Arah kebijakan dimaksud, antara lain:

a) Peningkatan produktivitas angkatan kerja berbasis keterampilan dan keahlian;
b) Penyediaan pelatihan terstruktur dan sertifikasi bagi pencari kerja sesuai kebutuhan pasar kerja;
c) Perluasan akses bursa kerja online serta dukungan terhadap penciptaan wirausaha baru;
d) Pengembangan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan kesempatan kerja;
e) Penguatan pembinaan dan kepatuhan organisasi ketenagakerjaan terhadap regulasi yang berlaku;
f) Peningkatan mutu layanan publik berbasis akuntabilitas dan kepuasan masyarakat.

Berdasarkan penahapan prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran Renstra perangkat daerah perlu dituangkan rumusan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah sehingga prioritas pembangunan dalam dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Adapun rumusan arah kebijkan renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3. 3 Perumusan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI (NSPK)	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	SDM unggul dan adaptif: kolaborasi dunia kerja, dunia pendidikan, dan dunia usaha	Peningkatan Produktivitas Angkatan Kerja Berbasis Keterampilan dan Keahlian	
2	Permenaker No. 2 Tahun 2016 tentang SKKNI dan Sertifikasi Kompetensi		Menyediakan pelatihan terstruktur dan sertifikasi bagi pencari kerja untuk meningkatkan daya saing sesuai kebutuhan pasar kerja	
3	Permenaker No. 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja		Memperluas akses bursa kerja online dan mendukung penciptaan wirausaha baru melalui kegiatan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan program padat karya	

NO	OPERASIONALISASI (NSPK)	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Permenaker No. 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan		Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja melalui Pengembangan Kemitraan dengan Berbagai Pihak swasta dan Masyarakat	
5	UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh		Meningkatkan Pembinaan dan kepatuhan Organisasi pengusaha dan Organisasi ketenagakerjaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku	
6	PermenPAN RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat		Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan melalui penguatan standar pelayanan dan sistem pengaduan publik	

Sebagai kesimpulan, strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara mencerminkan komitmen yang kuat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Setiap strategi dirancang dengan pendekatan yang terukur dan berbasis kebutuhan masyarakat, sementara arah kebijakan berfungsi sebagai panduan implementasi untuk memastikan keberhasilan setiap program. Dengan sinergi antara strategi dan kebijakan ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang harmonis, masyarakat yang sejahtera, dan kawasan transmigrasi yang berkembang secara berkelanjutan. Pendekatan yang holistik ini menempatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sebagai mitra utama dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang inklusif dan berdaya saing.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penjabaran visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara dituangkan secara lebih operasional ke dalam bentuk program, kegiatan, dan subkegiatan. Seluruhnya dirancang dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, serta kebutuhan pendanaan indikatif selama periode perencanaan lima tahun. Penyusunan program dan kegiatan ini mengacu pada ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam penyusunannya, diterapkan beberapa pendekatan penting yang mencakup:

1) Pendekatan kinerja, melalui penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan sistem perencanaan serta penganggaran terpadu.
2) Pendekatan pendanaan dan pagu indikatif, sebagai dasar alokasi sumber daya secara efisien, efektif, dan terukur.
3) Pendekatan prioritas program, berdasarkan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Program diartikan sebagai sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan terpadu, yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang memanfaatkan sumber daya guna mencapai indikator program. Sementara itu, indikator kinerja menjadi ukuran keberhasilan, dan kelompok sasaran dirumuskan secara spesifik agar memberikan kejelasan mengenai penerima manfaat.

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menetapkan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada bidang transmigrasi dan ketenagakerjaan.

4.1. Uraian Program

Berikut adalah program-program yang menjadi payung perencanaan penyelenggaraan urusan dinas:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
   6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   8) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
B. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
   1) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
C. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
   1) Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Satu Daerah Kabupaten/Kota
D. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
   1) Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian
E. Program Perencanaan Tenaga Kerja
   1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
F. Program Penempatan Tenaga Kerja
   1) Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
   2) Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
   3) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
   4) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Pra dan Purna Penempatan)
   5) Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
   6) Penerbitan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
G. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
   1) Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
   2) Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
   3) Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
   4) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

H. Program Hubungan Industrial

1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan.

4.2. Uraian Kegiatan

Kegiatan berikut merupakan kegiatan resmi sesuai nomenklatur yang berlaku. Seluruh nama kegiatan dituliskan apa adanya, tanpa pengurangan atau perubahan kalimat. Uraian yang diberikan hanya berupa penjabaran fungsi dan ruang lingkup pelaksanaannya.

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini meliputi penyusunan perencanaan tahunan, penganggaran berbasis kinerja, evaluasi kinerja, serta penyusunan laporan akuntabilitas perangkat daerah untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan berjalan efektif dan efisien.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Ruang lingkupnya mencakup pengelolaan anggaran, administrasi keuangan rutin, pertanggungjawaban belanja, pelaksanaan transaksi keuangan, serta penataan dokumen keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini mendukung penatausahaan aset dinas melalui pencatatan, inventarisasi, pelaporan, dan pemeliharaan Barang Milik Daerah agar tertib, akurat, dan mudah diawasi.

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Meliputi pengelolaan data pegawai, penyusunan SKP, pengembangan kompetensi, disiplin ASN, mutasi internal, kenaikan pangkat, presensi, dan pelayanan administrasi kepegawaian lainnya.

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Mengatur operasional administrasi harian perangkat daerah, termasuk persuratan, kearsipan, layanan umum, penyediaan sarana kantor, serta dukungan administratif lainnya.

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Melaksanakan proses pengadaan barang penunjang operasional dinas sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.

7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Berupa penyediaan jasa kebersihan, keamanan, layanan internet, perawatan sarana, serta jasa lainnya yang mendukung kelancaran pelayanan perangkat daerah.

8) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Fokus pada penyediaan fasilitas penunjang kerja seperti listrik, air, bahan bakar genset, dan layanan umum lainnya agar kegiatan pemerintahan berjalan lancar.

9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Mencakup pemeliharaan rutin dan berkala terhadap sarana prasarana kantor untuk menjamin kelayakan dan umur pakai aset daerah.

10) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Kegiatan ini menata kerangka perencanaan kawasan transmigrasi melalui pengumpulan data, analisis potensi wilayah, pemetaan kebutuhan lahan, penyusunan dokumen rencana kawasan, dan harmonisasi dengan RTRW/ KLHS.

11) Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini menata pergerakan dan penempatan penduduk transmigran dari daerah asal ke kawasan sasaran secara terencana, aman, dan sesuai kapasitas daya dukung kawasan.

12) Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian

Berfokus pada pendampingan desa transmigrasi menuju kemandirian, termasuk pengembangan ekonomi lokal, penguatan kelembagaan, dan pemenuhan sarana prasarana dasar.

13) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

Meliputi penyusunan rencana kebutuhan tenaga kerja daerah berdasarkan analisis angkatan kerja, kebutuhan industri, sektor unggulan, serta proyeksi pasar kerja jangka menengah.

14) Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan pelayanan pencari kerja melalui sistem antar kerja, termasuk verifikasi data pencari kerja dan referensi penempatan pada perusahaan yang membutuhkan.

15) Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Memberikan layanan perizinan kepada LPTKS sesuai regulasi dan melakukan pembinaan serta pengawasan operasionalnya.

16) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Mengelola data lowongan kerja, kebutuhan kompetensi industri, serta penyebaran informasi kepada masyarakat melalui berbagai kanal informasi ketenagakerjaan.

17) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

Melakukan edukasi, verifikasi dokumen, fasilitasi penyelesaian masalah, serta layanan reintegrasi sosial ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia.

18) Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten Kota

Fasilitasi antar kerja lokal, termasuk penyediaan layanan konsultasi penempatan dan rujukan peluang kerja.

19) Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Memberikan layanan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing sesuai ketentuan.

20) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

Menyelenggarakan pelatihan kerja berbasis standar kompetensi sesuai kebutuhan industri.

21) Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

Mengadministrasikan perizinan LPK serta melakukan pembinaan untuk menjaga mutu layanan pelatihan.

22) Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

Memberikan layanan konsultansi untuk peningkatan efisiensi usaha kecil melalui metode produktivitas.

23) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Melakukan asesmen produktivitas daerah sebagai dasar penetapan intervensi pengembangan ketenagakerjaan.

24) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Melakukan verifikasi dokumen PP dan PKB sebelum disahkan serta memberikan konsultasi kepada perusahaan dan pekerja.

25) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Meliputi mediasi, fasilitasi penyelesaian perselisihan, layanan konsultasi ketenagakerjaan, dan koordinasi tindakan saat mogok kerja atau penutupan perusahaan.

4.3. Uraian Subkegiatan

Subkegiatan berikut merupakan penjabaran dari kegiatan di atas, dengan uraian fungsi tanpa mengubah nama subkegiatan resmi.

A. Subkegiatan dari Kegiatan Penunjang

Nama subkegiatan tidak diberikan secara eksplisit dalam daftar sebelumnya, sehingga uraian diberikan secara generik sesuai karakter kegiatan penunjang:

- Pengelolaan administrasi perkantoran
- Pengelolaan keuangan dan pelaporan
- Pengelolaan aset dan pemeliharaan fasilitas
- Pengelolaan SDM Aparatur
- Pengelolaan operasional layanan umum

B. Subkegiatan dari Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Subkegiatan merupakan rangkaian teknis untuk mendukung kegiatan Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, meliputi:

- Survei dan pemetaan kawasan transmigrasi
- Penyusunan dokumen rencana kawasan
- Koordinasi lintas sektor terkait perencanaan transmigrasi

C. Subkegiatan dari Program Pembangunan & Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Untuk kegiatan Penataan Persebaran Penduduk dan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian, subkegiatannya berupa:

- Fasilitasi penyediaan sarana prasarana dasar
- Pendampingan pengembangan ekonomi kawasan
- Monitoring dan evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi

D. Subkegiatan dari Program Perencanaan Tenaga Kerja

Untuk kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK), subkegiatannya meliputi:

- Pengumpulan dan analisis data ketenagakerjaan
- Penyusunan dokumen RTK
- Penyelarasan RTK dengan RPJMD dan kebutuhan industri

E. Subkegiatan dari Program Penempatan Tenaga Kerja

Untuk seluruh kegiatan penempatan tenaga kerja, subkegiatannya meliputi:

- Layanan registrasi pencari kerja
- Penyebaran informasi pasar kerja
- Verifikasi izin LPTKS
- Layanan perpanjangan IMTA
- Fasilitasi penempatan tenaga kerja lokal
- Layanan pelindungan PMI pra dan purna penempatan

F. Subkegiatan dari Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Untuk seluruh kegiatan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja meliputi:

- Pelaksanaan pelatihan kompetensi teknis
- Pelaksanaan sertifikasi kompetensi
- Pembinaan LPK
- Pelaksanaan konsultansi produktivitas
- Pelaksanaan pengukuran produktivitas daerah

G. Subkegiatan dari Program Hubungan Industrial

Subkegiatan pendukung:

- Verifikasi dokumen PP dan PKB
- Pelaksanaan mediasi hubungan industrial
- Penyuluhan norma ketenagakerjaan
- Pendataan dan tindak lanjut perselisihan ketenagakerjaan

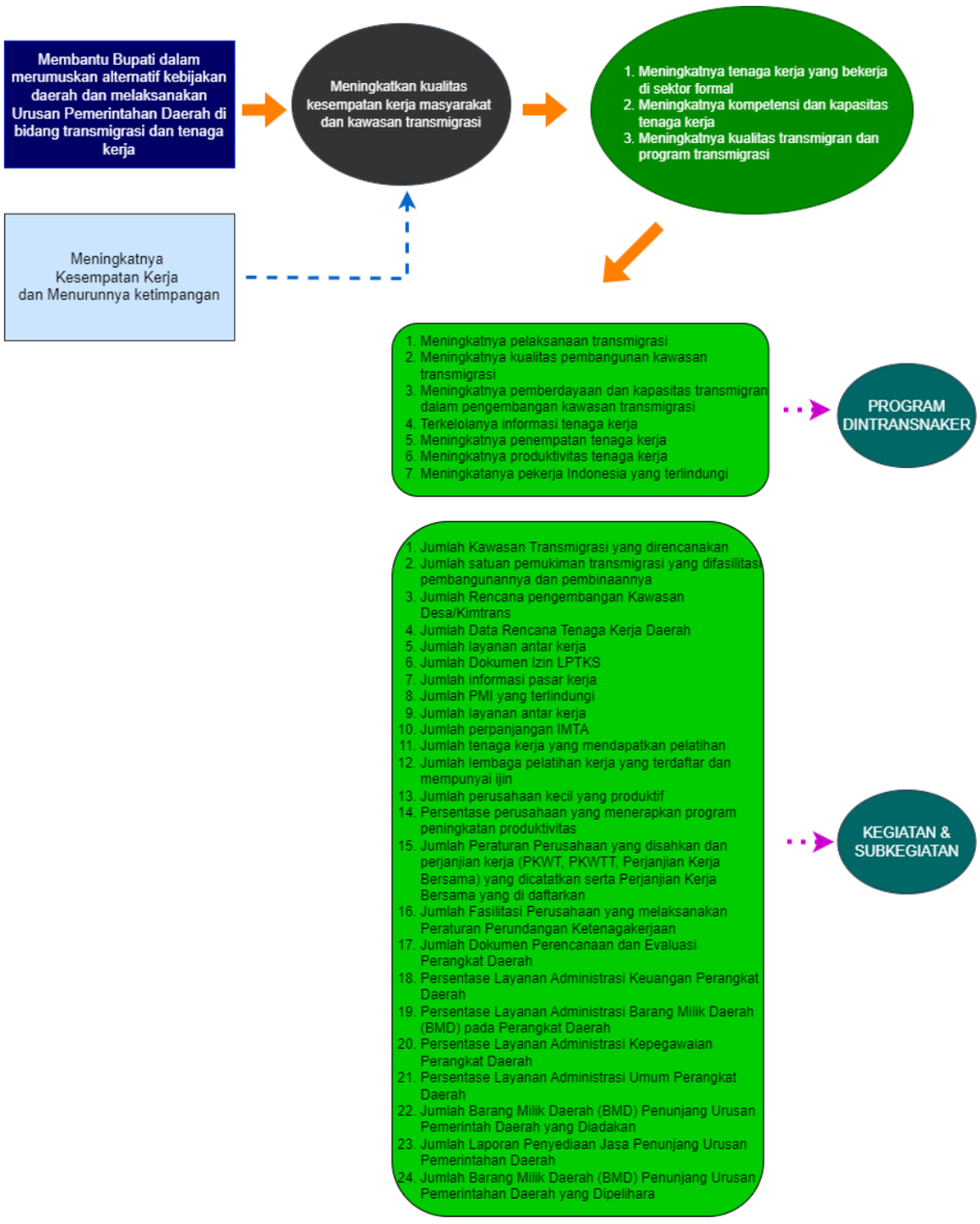

Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator kinerja, dan pendanaan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai KartanegaraTahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCAME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	.(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(12)
Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Menurunnya ketimpangan							
	Meningkatkan kualitas kesempatan kerja masyarakat dan kawasan transmigrasi				**Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi**		
		Meningkatnya Cakupan program transmigrasi yang dilaksanakan			**'Persentase Program Transmigrasi yang dilaksanakan**		
			Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi		**Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan**	**Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi**	**Program**
					Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan	**Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi**	**Kegiatan**
					Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Sub
					Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Sub
					Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Sub
					Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Sub

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCAME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	.(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(12)
			Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi		**Persentase Kawasan Desa/Kimtrans yang ditata/dibangun**	**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**Program**
					Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya	**Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kegiatan**
					Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Sub
					Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Sub
					Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Sub
					Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Sub
					Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Pelatihan Transmigrasi lokal	Sub
					Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Sub
			Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan		**Persentase Kawasan Desa/Kimtrans yang dikembangkan**	**Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi**	**Program**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCAME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	.(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(12)
			kawasan transmigrasi				
					Jumlah Rencana pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans	**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian**	**Kegiatan**
					Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Sub
					Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Sub
Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Menurunnya ketimpangan					**Tingkat Pengangguran Terbuka**		
	Meningkatkan kualitas kesempatan kerja masyarakat dan kawasan transmigrasi				**Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja**		
		Meningkatnya tenaga kerja yang bekerja di sektor formal			Persentase Penduduk Bekerja 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja di Sektor Formal		
			Terkelolanya informasi tenaga kerja		**Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada RTKD**	**Program Perencanaan Tenaga Kerja**	**Program**
					Jumlah Data Rencana Tenaga Kerja Daerah	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Kegiatan**
					Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Sub
					Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Sub
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja		**Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri**	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Program**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCAME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	.(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(12)
					Jumlah layanan antar kerja	**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kegiatan**
					Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Sub
					Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Pelayanan antar Kerja	Sub
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Sub
					Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Sub
					Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja	Sub
					Jumlah Dokumen Izin LPTKS	**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kegiatan**
					Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Sub
					Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Sub
					Jumlah informasi pasar kerja	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Kegiatan**
					Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Sub
					Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Sub

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCAME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	.(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(12)
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	Sub
					Jumlah PMI yang terlindungi	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kegiatan**
					Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Peningkatan pelindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Sub
					Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran	Sub
					Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Sub
					Jumlah layanan antar kerja	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten Kota**	**Kegiatan**
					Jumlah Perusahaan yang mendapatkan penghargaan karena memperkerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas	Pemberian Penghargaan kepada Perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas	Sub
					Jumlah OAP yang diberdayakan melalui Kegiatan Kewirausahaan	Pemberdayaan bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan	Sub
					Jumlah dokumen Hasil Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua Jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi sesuai Kebutuhan Yang telah dilaksanakan	Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi sesuai kebutuhan	Sub
					Jumlah perpanjangan IMTA	**Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kegiatan**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCAME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	.(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(12)
					Jumlah Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota Yang Divalidasi	Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Sub
		Meningkatnya kompetensi dan kapasitas tenaga kerja			**Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi****		
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja		**Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya**	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Program**
					Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Kegiatan**
					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Sub
					Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Sub
					Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Sub
					Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Sub
					Tersedianya Sarana Pelatihan Vokasi dan ProduktivitasJumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Sub

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCAME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	.(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(12)
					Jumlah lembaga pelatihan kerja yang tersedia	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Keiatan
					Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Sub
					Jumlah lembaga pelatihan kerja yang terdaftar dan mempunyai ijin	**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	**Kegiatan**
					Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Sub
					Jumlah perusahaan kecil yang produktif	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Kegiatan**
					Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Sub
					Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kegiatan**
					Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Sub
			Meningkatanya pekerja Indonesia yang terlindungi		**Persentase Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial**	**Program Hubungan Industrial**	**Program**
					Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja (PKWT, PKWTT, Perjanjian Kerja Bersama) yang dicatatkan serta Perjanjian Kerja Bersama yang di daftarkan	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kegiatan**
					Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Sub

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCAME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	.(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(12)
					Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Sub
					Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Sub
					Jumlah Fasilitasi Perusahaan yang melaksanakan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kegiatan**
					Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub
					Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub
					Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Sub
					Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Sub
					Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja	Sub
Meningkatnya akuntabilitas					**Nilai SAKIP**		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCAME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	.(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(12)
kinerja pemerintah daerah							
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik				**Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah**		
		Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah			**Nilai AKIP Perangkat Daerah**		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Program**
					Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kegiatan**
					jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub
					Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub
					Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub
					Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sub
					Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Sub
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja tepat waktu	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub
					Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Satistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan walidata pendukung stastistik sektoral Daerah	Sub

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCAME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	.(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(12)
					Jumlah Data Statistik SektoralDaerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data statistik Sektoral Daerah	Sub
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Sub
					Jumlah Subsatansi Koordinasi Peningkatan Partisi[asi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang diampu	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Dalam yang diampu	Sub
					Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sub
					Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kegiatan**
					Jumlah Aparatur	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub
					Tersedianya jasa operator dan pengelola sistem informasi	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub
					Jumlah dokumen yang diverifikasi tepat waktu	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub
					Terlaksananya akuntabilitas perangkat daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sub

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCAME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	.(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(12)
					Jumlah laporan keuangan tepat waktu	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub
					Jumlah dokumen sakip yang diperiksa	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Sub
					Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sub
					Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sub
					Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kegiatan**
					Jumlah dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sub
					Jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sub
					JumlahLaporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Sub
					Jumlah Laporan Hasil pembinaan, pengawasan & pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub
					Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub
					Jumlah Laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub
					Jumlah dokumen Hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Sub

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCAME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	.(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(12)
					Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kegiatan**
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Sub
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sub
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sub
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sub
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sub
					Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Sub
					Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Sub
					Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Pemindahan Tugas ASN	Sub
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sub
					Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub
					Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kegiatan**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCAME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	.(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(12)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub
					Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sub
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub
					Tersedianya Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sub
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sub
					Jumlah Paket bahan/material yang disediakan	Penyediaan Bahan/Material	Sub
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sub
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sub
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sub
					Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kegiatan**
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCAME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	.(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(12)
					Jumlah Unit alat berat yang disediakan	Pengadaan Alat Besar	Sub
					Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Bermotor yang disediakan	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Sub
					Jumlah Paket mebel yang disediakan	Pengadaan Mebel	Sub
					Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainya yang disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainya yang disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainya	Sub
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Sub
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainya yang disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub
					Jumlah Unit Sarana Prasaranan Gedung Kantor atau Bangunan Lainya yang disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub
					Jumlah Unit Sarana Prasaranan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainya yang disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kegiatan**
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCAME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	.(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(12)
					Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kegiatan**
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub
					Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Sub
					Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Sub
					Jumlah mebel yang dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Sub
					Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub
					Jumlah aset tetap yang dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Sub
					Jumlah Aset tak Berwujud yang dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Sub
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCAME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	.(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(12)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub
					Luas Tanah yang dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Sub

Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUT COME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terselengaranya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**70,92**	**72,26**	**15.039.494.450,00**	**72,76**	**18.855.732.767,72**	**73,26**	**18.735.505.607,34**	**73,76**	**18.928.184.918,09**	**74,26**	**20.334.277.768,99**	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**		**4 Dokumen**	**550.000.000,00**	**4 Dokumen**	**800.000.000,00**	**4 Dokumen**	**900.000.000,00**	**4 Dokumen**	**950.000.000,00**	**4 Dokumen**	**1.150.000.000,00**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	2	150.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	4	400.000.000,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	2	100.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	350.000.000,00	2	350.000.000,00	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-0	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-0	1	200.000.000,00	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusanyang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUT COME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terselenggaranya Administratis Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**10.689.842.450,00**	**100**	**10.691.209.606,00**	**100**	**10.688.345.607,34**	**100**	**10.689.577.918,09**	**100**	**10.694.117.768,99**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68	90	10.439.842.450,00	90	10.441.209.606,00	90	10.438.345.607,34	90	10.439.577.918,09	90	10.444.117.768,99	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	1	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah**	**Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100.000.000,00**	**100**	**175.000.000,00**	**100**	**175.000.000,00**	**100**	**175.000.000,00**	**100**	**175.000.000,00**	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUT COME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	1	25.000.000,00	-	-	2	50.000.000,00	-	-	-	-	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0	-0	-	1	50.000.000,00	-	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**185.000.000,00**	**100**	**800.000.000,00**	**100**	**650.000.000,00**	**100**	**850.000.000,00**	**100**	**800.000.000,00**	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	1	40.000.000,00	-	-	1	150.000.000,00	-	-	-	-	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	198	0	-	96	350.000.000,00	-	-	96	350.000.000,00	-	-	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	6	70.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUT COME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	66	96	25.000.000,00	96	50.000.000,00	96	50.000.000,00	96	50.000.000,00	96	50.000.000,00	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	19	-0	-	25	150.000.000,00	30	200.000.000,00	30	200.000.000,00	70	500.000.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Admistrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**410.000.000,00**	**100**	**1.550.000.000,00**	**100**	**1.600.000.000,00**	**100**	**1.850.000.000,00**	**100**	**1.850.000.000,00**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	30.000.000,00	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	25.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	30.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	20.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	
Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	25.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUT COME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	1	20.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	1	110.000.000,00	1	450.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan**	**7**	**7**	**1.190.000.000,00**	**7**	**2.617.363.161,72**	**7**	**2.400.000.000,00**	**7**	**2.240.000.000,00**	**7**	**2.965.000.000,00**	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-6	- 0	-	3	1.200.000.000,00	3	1.100.000.000,00	-	-	-	-	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2-	2	990.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	194	3	100.000.000,00	-	-	15	300.000.000,00	300	990.000.000,00	-	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	279	10	100.000.000,00	42	397.363.161,72	-	-	10	250.000.000,00	43	850.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUT COME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0	- 0	-	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	- 0	-	1	500.000.000,00	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	3	1.815.000.000,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	38	- 0	-	15	220.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	- 0	-	1	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12**	**12**	**1.088.492.000,00**	**12**	**1.424.000.000,00**	**12**	**1.424.000.000,00**	**12**	**1.424.000.000,00**	**12**	**1.424.000.000,00**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	2.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	350.000.000,00	12	350.000.000,00	12	350.000.000,00	12	350.000.000,00	12	350.000.000,00	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	666.492.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUT COME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	**4**	**4**	**826.160.000,00**	**4**	**798.160.000,00**	**4**	**898.160.000,00**	**4**	**749.607.000,00**	**4**	**1.276.160.000,00**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16	6	248.160.000,00	6	248.160.000,00	6	248.160.000,00	6	248.160.000,00	6	248.160.000,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	11	28.000.000,00	11	50.000.000,00	11	50.000.000,00	11	28.000.000,00	11	28.000.000,00	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0	1	50.000.000,00	0	0	-	-	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	1	300.000.000,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	-		2	500.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00	1	273.447.000,00	1	300.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	42	38	100.000.000,00	36	100.000.000,00	18	50.000.000,00	36	100.000.000,00	36	100.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUT COME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program Perencanaan Tenaga Kerja	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah**	**Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada RTKD**	**100**	**100**	**75.000.000,00**	**100**	**150.000.000,00**	**100**	**150.000.000,00**	**100**	**150.000.000,00**	**100**	**550.000.000,00**	**Bidang Penempatan Tenaga Kerja**
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		**Jumlah Data Rencana Tenaga Kerja Daerah**	**2**	**1**	**75.000.000,00**	**1**	**150.000.000,00**	**1**	**150.000.000,00**	**2**	**150.000.000,00**	**2**	**550.000.000,00**	
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	-0	0	00	0	00	0	00	0	00	1	400.000.000,00	
Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	-0	10	75.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00	15	150.000.000,00	
Program Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	**Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja**	**Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya**	**21,79**	**22,93**	**4.150.000.000,00**	**23,12**	**6.462.020.000,00**	**23,47**	**6.549.525.000,00**	**23,78**	**8.233.885.000,00**	**24,07**	**8.664.505.000,00**	**Bidang Penempatan Tenaga Kerja**
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	2370	2559	4.020.000.000,00	3007	6.252.020.000,00	3307	6.316.025.000,00	3607	7.972.385.000,00	3907	8.393.005.000,00	
Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	2370	2559	4.020.000.000,00	3007	5.500.000.000,00	3307	5.500.000.000,00	3607	5.500.000.000,00	3907	5.500.000.000,00	
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	0	-0	- 00	7	302.500.000,00	11	366.025.000,00	13	475.832.000,00	15	603.941.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUT COME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	0	0	-	1	349.520.000,00	1	350.000.000,00	4	1.000.000.000,00	4	1.000.000.000,00	
Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas		Tersedianya Sarana Pelatihan Vokasi dan ProduktivitasJumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	0	0	-	0	-	-	-	2	646.553.000,00	4	889.064.000,00	
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas		Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	0	0	-	6	100.000.000,00	12	100.000.000,00	20	350.000.000,00	29	400.000.000,00	
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja yang tersedia	15	15	50.000.000,00	15	60.000.000,00	16	63.500.000,00	17	71.500.000,00	17	71.500.000,00	
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15	15	50.000.000,00	15	60.000.000,00	16	63.500.000,00	17	71.500.000,00	17	71.500.000,00	
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	**Terlakananya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	**Jumlah lembaga pelatihan kerja yang terdaftar dan mempunyai ijin**	0	0	-	10	50.000.000,00	12	60.000.000,00	14	70.000.000,00	16	80.000.000,00	
Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi		Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	0	0		10	50.000.000,00	12	60.000.000,00	14	70.000.000,00	16	80.000.000,00	
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	15	30	30.000.000,00	25	50.000.000,00	30	60.000.000,00	35	70.000.000,00	35	70.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUT COME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	15	30	30.000.000,00	25	50.000.000,00	30	60.000.000,00	35	70.000.000,00	35	70.000.000,00	
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
Program Penempatan Tenaga Kerja	**Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja**	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	**18,05**	**24,43**	**3.405.000.000,00**	**26,85**	**3.050.000.000,00**	**29,00**	**4.240.284.554,00**	**30,93**	**5.150.000.000,00**	**32,66**	**6.050.000.000,00**	**Bidang Penempatan Tenaga Kerja**
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan antar kerja	2	2	3.030.000.000,00	2	2.350.000.000,00	2	3.000.000.000,00	2	4.050.000.000,00	2	5.050.000.000,00	
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja		Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	50	30	150.000.000,00	60	300.000.000,00	60	350.000.000,00	60	300.000.000,00	60	300.000.000,00	
Pelayanan antar Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	50	30	70.000.000,00	60	150.000.000,00	60	150.000.000,00	60	150.000.000,00	60	150.000.000,00	
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100	120	120.000.000,00	150	150.000.000,00	200	200.000.000,00	200	200.000.000,00	200	200.000.000,00	
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	30	35	200.000.000,00	35	250.000.000,00	40	300.000.000,00	45	400.000.000,00	50	400.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUT COME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	670	240	2.490.000.000,00	390	1.500.000.000,00	590	2.000.000.000,00	890	3.000.000.000,00	1290	4.000.000.000,00	
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku (Lembaga)**	-	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	
Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi		Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi (Lembaga)		0	-	5	50.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS		Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	1	2	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Terkelolalnya Informasi Pasar Kerja**	Jumlah informasi pasar kerja	2	1	250.000.000,00	1	500.000.000,00	1	790.284.554,00	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00	
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	-	-	-	1	200.000.000,00	1	290.284.554,00	-	-	-	-	
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	-	-	-	-	-	200	200.000.000,00	-	-	-	-	
Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	60	100	250.000.000,00	120	300.000.000,00	120	300.000.000,00	150	600.000.000,00	150	600.000.000,00	
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	**Terlindunginya PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah PMI yang terlindungi	-	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	200.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUT COME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Peningkatan pelindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	0	15	75.000.000,00	25	100.000.000,00	50	150.000.000,00	50	150.000.000,00	50	150.000.000,00	
Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran		Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	-	-	-	-	-	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	50.000.000,00	
Program Hubungan Industrial	**Meningkatnya Hubungan Industrial dan Perlindungan Hak Hak Pekerja**	**Persentase Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial**	**100**	**100**	**10.600.000.000,00**	**100**	**11.741.700.000,00**	**100**	**12.144.700.000,00**	**100**	**12.086.700.000,00**	**100**	**12.136.700.000,00**	**Bidang Hubungan Industrial**
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Hubungan Industrial dan Perlindungan Hak Hak Pekerja**	**Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja (PKWT, PKWTT, Perjanjian Kerja Bersama) yang dicatatkan serta Perjanjian Kerja Bersama yang di daftarkan**	**88**	**20**	**350.000.000,00**	**30**	**717.000.000,00**	**40**	**1.070.000.000,00**	**40**	**962.000.000,00**	**40**	**962.000.000,00**	**Bidang Hubungan Industrial**
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	19	15	100.000.000,00	20	150.000.000,00	25	275.000.000,00	25	200.000.000,00	25	200.000.000,00	
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	9	5	100.000.000,00	10	150.000.000,00	15	275.000.000,00	15	200.000.000,00	15	200.000.000,00	
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang	2	12	150.000.000,00	12	417.000.000,00	12	520.000.000,00	12	562.000.000,00	12	562.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUT COME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengupahan		Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan												
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Fasilitasi Perusahaan yang melaksanakan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan**	**108**	**170**	**10.250.000.000,00**	**185**	**11.024.700.000,00**	**185**	**11.074.700.000,00**	**115**	**11.124.700.000,00**	**115**	**11.174.700.000,00**	**Bidang Hubungan Industrial**
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	23	50	150.000.000,00	65	200.000.000,00	65	200.000.000,00	65	200.000.000,00	245	200.000.000,00	
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	85	120	150.000.000,00	120	150.000.000,00	120	150.000.000,00	120	150.000.000,00	120	150.000.000,00	
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	6	6	150.000.000,00	6	200.000.000,00	6	200.000.000,00	6	200.000.000,00	6	200.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUT COME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Buruh serta non afiliasi														
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00	1	300.000.000,00	
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	35440	48729	9.650.000.000,00	48.729	10.324.700.000,00	48.729	10.324.700.000,00	48.729	10.324.700.000,00	48.729	10.324.700.000,00	
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	**Meningkatnya Perencanaan Kawasan Transmigrasi**	**Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan**	**15**	**25,00**	**100.000.000,00**	**50,00**	**800.000.000,00**	**75,00**	**800.000.000,00**	**100**	**1.200.000.000,00**	**100**	**1.200.000.000,00**	
Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		**Jumlah Kawasan Transmigrasi yang direncanakan**	**2 RKT**	**1**	**100.000.000,00**	**1**	**800.000.000,00**	**1**	**800.000.000,00**	**1**	**1.200.000.000,00**	**1**	**1.200.000.000,00**	
Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan		Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	N.a	1	50.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	
Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi		Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	33415,65	-	-	8.053,73	400.000.000,00	10196,43	400.000.000,00	7183,24	600.000.000,00	7183,24	600.000.000,00	
Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	N.a	1	50.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	**Terlaksananya Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**Persentase Kawasan Desa/Kimtrans yang ditata/dibangun**		**-**	**-**	**25**	**100.000.000,00**	**50**	**200.000.000,00**	**75**	**200.000.000,00**	**100**	**200.000.000,00**	
Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		**Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya**	**0**	**-**	**-**	**1**	**100.000.000,00**	**1**	**200.000.000,00**	**1**	**200.000.000,00**	**1**	**200.000.000,00**	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUT COME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Keterangan
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang ber-asal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	-	1	100.000.000,00							
Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran		Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	-	-	-	-	-	200	200.000.000,00	-	-	-	-	
Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi		Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)	-	-	-	-	-	-	-	200	200.000.000,00	200	200.000.000,00	
Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigran		Jumlah Lokasi Transmigran yang dilaksanakan monitoring dan Evaluasi												
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	**Terlaksananya Pengembangan Kawasan Transmigrasi**	**Persentase Kawasan Desa/Kimtrans yang dikembangkan**			**-**		**-**		**-**	**100**	**150.000.000,00**	**100**	**150.000.000,00**	
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian		**Jumlah Rencana pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans**		**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**1**	**150.000.000,00**	**1**	**150.000.000,00**	
Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman		Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	0	-	-	-	-	-	-	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	
TOTAL					**33.369.494.450,00**		**41.159.452.767,72**		**42.820.015.161,34**		**46.098.769.918,09**		**49.285.482.768,99**	

4.4. Uraian Subkegiatan Dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Subkegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan bagian penting dalam memastikan ketercapaian sasaran strategis daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029. Subkegiatan ini dipilih berdasarkan relevansi langsungnya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung pencapaian outcome pembangunan daerah, khususnya melalui peningkatan kompetensi angkatan kerja, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas penempatan tenaga kerja, serta penguatan sistem hubungan industrial yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Subkegiatan prioritas yang dicantumkan pada bagian ini merupakan hasil seleksi dari berbagai kegiatan dan subkegiatan yang memiliki nilai strategis tinggi, dampak langsung terhadap penerima manfaat, serta berkontribusi pada pencapaian target program prioritas Bupati. Pelaksanaan subkegiatan ini diharapkan mampu memberi dorongan signifikan terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja, pengurangan angka pengangguran, perluasan lapangan pekerjaan, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

Lebih lanjut, subkegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pelatihan, serta masyarakat dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, responsif, dan berdaya saing. Dengan demikian, pelaksanaan subkegiatan prioritas tidak hanya bersifat administratif, namun berorientasi pada pencapaian perubahan yang nyata dan terukur.

Adapun daftar subkegiatan yang secara langsung mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN PRIORITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya angkatan kerja yang kompeten dan produktif	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kegiatan
			Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Program Prioritas Bupati dengan target peningkatan penempatan kerja penyandang disabilitas serta kontribusi pada penurunan angka kemiskinan.
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan
			Perluasan Kesempatan Kerja	Sub Kegiatan
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kegatan
			Job Fair/Bursa Kerja	Sub Kegiatan
3	Program Hubungan Industrial	Meningkatanya pekerja Indonesia yang terlindungi	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja	Sub Kegiatan

4.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah merupakan ukuran kunci yang menggambarkan tingkat keberhasilan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2025–2029. IKU disusun untuk memastikan bahwa kinerja perangkat daerah dapat diukur secara obyektif, terarah, serta selaras dengan indikator pembangunan daerah dan indikator nasional yang relevan.

IKU dirumuskan berdasarkan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), sehingga setiap indikator dapat digunakan secara efektif untuk menilai capaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan transmigrasi dan ketenagakerjaan. Selain itu, indikator ini dipilih karena memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta penguatan perlindungan bagi pekerja, termasuk kelompok rentan.

Penetapan IKU juga mempertimbangkan keterkaitan antara tujuan nasional, provinsi, dan daerah, termasuk target pembangunan sumber daya manusia, peningkatan kompetensi tenaga kerja menghadapi kebutuhan industri (khususnya dalam mendukung pembangunan IKN), serta penguatan tata kelola transmigrasi berbasis keberlanjutan dan pemanfaatan kawasan secara optimal.

Indikator-indikator tersebut menjadi tolok ukur utama dalam proses evaluasi kinerja perangkat daerah dan digunakan sebagai dasar untuk mengukur akuntabilitas, efektivitas pelaksanaan program, serta kontribusi perangkat daerah terhadap capaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, IKU tidak hanya berfungsi sebagai alat monitoring, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk perbaikan berkelanjutan dan penentuan arah kebijakan di masa mendatang.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama PD

NO.	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	15	18	25	50	75	100	100	Kesiapan Lahan Untuk Kawasan Transmigrasi
2	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	20,50	21,86	22,93	23,12	23,47	23,78	24,07	
4	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	10,37	12,35	24,43	26,85	29,00	30,93	32,66	
5	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	100	100	100	100	100	100	100	

4.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah merupakan indikator turunan dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berfungsi untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih operasional pada level perangkat daerah. IKK memberikan gambaran kinerja yang lebih rinci dan berfokus pada outcome maupun output dari penyelenggaraan urusan transmigrasi dan ketenagakerjaan dalam jangka menengah.

IKK disusun agar mampu menunjukkan kontribusi nyata perangkat daerah terhadap pencapaian sasaran Renstra, sekaligus menjadi alat kontrol internal dalam memastikan konsistensi pelaksanaan program dengan rencana pembangunan daerah. Melalui IKK, evaluasi kinerja dapat dilakukan secara berkala dan terstruktur berdasarkan capaian kegiatan, efektivitas pelaksanaan program, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Penetapan IKK juga mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain:

1) Relevansi dengan tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, mencakup urusan penempatan tenaga kerja, pelatihan kerja, produktivitas, hubungan industrial, dan transmigrasi.
2) Kemampuan indikator untuk memberikan informasi kinerja yang dapat ditindaklanjuti, baik sebagai instrumen perbaikan maupun dasar pengambilan keputusan.
3) Kesesuaian dengan indikator pembangunan daerah, terutama terkait peningkatan kualitas SDM, produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan tata kelola ketenagakerjaan dan transmigrasi.
4) Keberlanjutan pengukuran, sehingga indikator dapat dipantau secara konsisten sepanjang periode Renstra.

Adapun Indikator Kinerja Kunci Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci

NO.	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu kerencana tenaga kerja	100	100	100	100	100	100	100	%
2	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	20,50	24,34	23,89	24,10	30,51	21,50	21,50	%
3	Tingkat Produktivitas Tenaga kerja	38	39,21	40,60	42,19	44,01	46,10	48,57	%
4	Persentase Perusahaan yangmenerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bopartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	52,44	50,00	51,25	51,50	52,30	52,45	53,00	%
5	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/Kota	10,37	12,35	24,43	26,85	29,00	30,93	32,66	%

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman dalam merumuskan arah pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang terintegrasi, inklusif, berkelanjutan, serta berbasis pada potensi dan kebutuhan daerah. Dokumen ini memuat isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dirancang untuk mendukung pencapaian visi pembangunan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial yang harmonis, serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam mengawal pelaksanaan Renstra Dinas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, maka perlu ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

1. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja setiap tahun, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).

2. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan secara konsisten sesuai dengan perencanaan tahunan, dengan memperhatikan target kinerja, indikator, serta pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

3. Pengendalian pelaksanaan Renstra dilakukan melalui pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Renja secara berkala, baik secara triwulanan maupun tahunan, untuk memastikan kesesuaian antara rencana, realisasi, dan capaian kinerja.

4. Kepala Dinas melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan menggunakan hasil evaluasi Renja, yang mencakup evaluasi terhadap masukan, proses, keluaran, dan hasil program serta kegiatan.

5. Evaluasi Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam periode lima tahunan untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis, efektivitas kebijakan, serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

6. Apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi ditemukan ketidaksesuaian atau perubahan kondisi strategis daerah, maka penyesuaian atau perubahan Renstra dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang adil, produktif, dan berdaya saing, melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, penataan hubungan industrial yang kondusif, serta pengembangan kawasan transmigrasi yang mandiri dan berkelanjutan. Pembangunan ketenagakerjaan tidak hanya berorientasi pada penyerapan tenaga kerja, tetapi juga berpihak pada kelompok pencari kerja, pekerja rentan, dan masyarakat transmigrasi yang memiliki keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi.

Kami menyadari bahwa penyempurnaan dokumen Renstra ini sangat bergantung pada masukan dan kolaborasi para pemangku kepentingan, baik di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari seluruh pihak sangat diharapkan guna mewujudkan perencanaan yang adaptif, responsif terhadap dinamika ketenagakerjaan dan transmigrasi, serta berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi pijakan yang kuat dalam pelaksanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang terarah, terukur, dan berkelanjutan menuju Kutai Kartanegara yang maju dan sejahtera..

Tenggarong, 24 Desember 2025

Plt. Kepala Dinas Transmigrasi dan
Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara

Akhmad Taufik Hidayat, S.IP., MM
NIP. 19670420 198803 1 014